

TESIS

ETIKA POLITIK GEREJA PASCA KONFLIK

“Mendialogkan Dietrich Bonhoeffer dengan Gereja Pasca Konflik Poso”



Disusun oleh :

Riston Antonius Purede

50120330

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

JOGJAKARTA

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul :

ETIKA POLITIK GEREJA PASCA KONFLIK

“ Mendialogkan Dietrich Bonhoeffer dengan Gereja Pasca Konflik Poso”

Telah dipertahankan oleh :

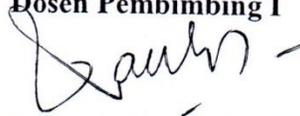
Riston Antonius Purede

50120330

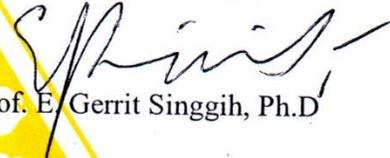
Dalam ujian Tesis yang dilaksanakan oleh Dewan Dosen Penguji Tesis
Program Pasca Sarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Pada tanggal 15 July 2016

Dosen Pembimbing I


Pdt. Paulus S Widjaja, MAPS, Ph.D

Dosen Pembimbing II


Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D

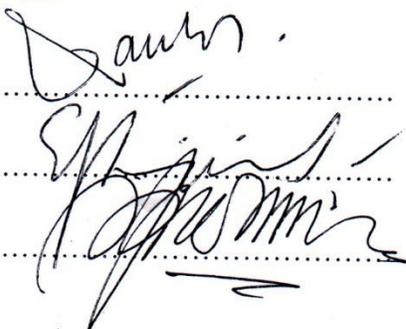
Direktur Program Pasca Sarjana


Pdt. Handi Hadiwitanto, Ph.D

DUTA WACANA

Dewan Penguji :

1. Pdt. Paulus S Widjaja, MAPS, Ph.D
2. Pdt. Prof. E. Gerrit Singgih, Ph.D
3. Pdt. Wahyu Satrio Wibowo, Ph.D


.....
.....
.....

LEMBAR PERNYATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Riston Antonius Purede

NIM : 50120330

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ini adalah karya sendiri dan bahwa catatan referensi yang tertera dalam karya tulis ini, telah saya tuliskan dengan kaidah penulisan yang ilmiah. Jika dikemudian hari saya terbukti menyalahi aturan dan terbukti melakukan plagiat, saya bersedia menerima semua sanksi yang diberikan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016



Riston Antonius Purede

KATA PENGANTAR

Ketika penulis memasuki dunia pelayanan di beberapa gereja yang sempat menjadi tempat praktek melayani, penulis merasakan sebenarnya Gereja asing dengan lingkungannya. Gereja memiliki komunitasnya sendiri dan sedikit sekali menjalin relasi dengan lingkungan dan komunitas lainnya di sekitar gereja. Kegiatan pelayanan yang berciri politis pun masih sangat sedikit dan terbatas pada hal-hal tertentu saja, biasanya terkait hal-hal yang menyangkut politik praktis. Kondisi yang lebih miris adalah gereja-gereja di wilayah bekas konflik sosial seperti di Poso, Sulawesi Tengah. Gereja pasca konflik harus merekonstruksi semua teologinya dari awal atau lebih tepatnya menginovasi teologinya agar relevan dengan konteks pengalaman konflik sosial. Teologi yang menghasilkan sebuah etika politik yang bersumber dari iman Kristen kini mendapat porsi penting dalam membimbing kehidupan umat dalam relasinya dengan masyarakat, dan tentu saja pembangunan jemaat pasca konflik juga menyentuh aspek ini sebagai bagian dari desain besar rekonsiliasi.

Dorongan ini membuat penulis memilih konsentrasi pada etika politik khususnya pada etika politik yang lebih menyentuh aspek mikro dari politik itu sendiri yaitu relasi antar person dalam masyarakat. Bagi penulis politik dalam tataran mikro lebih relevan dan juga lebih sederhana dan terjangkau oleh kapasitas dan kompetensi gereja yang baru bangkit dari keterpurukan karena konflik sosial. Penulis sempat kurang yakin dengan konsentrasi minat etika politik akan tetapi beberapa perubahan dan pengalaman baru membuat penulis yakin untuk menjalani bidang minat etika politik. Penulis sadar segala keterbatasan dan kelemahan dari cara berpikir penulis, karena itu penulis berterima kasih sekali terhadap beberapa orang yang berperan besar dalam keberhasilan penulis menyelesaikan pendidikan pasca sarjana ini. Pribadi-pribadi yang memperkaya pengetahuan dan pengalaman penulis. Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, akan tetapi rasa terima kasih yang tulus dan mendalam hanya bisa penulis bagikan dalam doa. Penulis tidak pernah bisa membalas semua bantuan, keceriaan, semangat, saran dan kritik yang membuat penulis sampai pada tahap ini. Penulis berterima kasih kepada :

- Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang sering penulis sakiti hatinya dengan segala kesalahan penulis, tetapi tetap memberikan perlindungan dan berkat-berkatNya. Kalau boleh jadikan saya alat Mu.
- Sudin Purede & Ni Nyoman Paulina. Dua orang hebat yang mengajarkan penulis bagaimana caranya bermimpi dan terus memelihara mimpi itu. Terima kasih atas semuanya. Papa dan Mama adalah harta terbesar ku...
- Martha One Roch Mitayani. Perempuan Jogja yang mengajarkan bagaimana kerasnya hidup, pentingnya doa yang teratur dan disiplin, serta bagaimana memelihara rasa sayang dan cinta yang tulus. Semoga engkau menjadi pendamping hidupku.
- Pdt. Paulus Sugeng Widjaja. Pembimbing yang begitu sabar menghadapi mahasiswa yang banyak tingkah ini dan senantiasa menguatkan penulis ketika masa-masa depresi melanda penulis. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak.
- Pdt. Gerrit Singgih yang selalu menginspirasi. Penulis belajar banyak hal, satu yang penulis catat adalah kerendahan hati beliau dan kesabran membimbing mahasiswa yang masih sangat labil seperti penulis. Semoga sehat selalu dan panjang umur Prof...

- Eyang YF Sadarmi yang senantiasa mendoakan penulis. Dalam usia lanjutnya masih memiliki kehidupan doa yang disiplin dan selalu mengajarkan penulis untuk senantiasa membantu orang lain.
- Mbak Meeta. Konsultan TIPP yang juga mengajarkan banyak hal kepada penulis dan membantu penulis memantapkan hati untuk konsentrasi di bidang etika politik...
- Ibu Etty MKH. Terima kasih atas masukan dan saran tentang topic tesis dan masukan terkait cara berpikir keberpihakan terhadap suatu teori dalam tesis.
- Pak Susilo dan Istri. Bapak kost yang sudah memandang penulis sebagai anak dan memberikan kebebasan dan kenyamanan yang luar biasa bagi lingkungan tempat tinggal penulis.
- Bpk. Moh. Najib beserta jajaran staf di Bawaslu DIY. Terima kasih telah mengajarkan penulis banyak hal terkait pemilu dan demokrasi. Dari beliau dan komisioner lainnya penulis belajar untuk mencurahkan perhatian yang serius terhadap demokrasi di Indonesia.
- Jajaran Majelis GKJ Karang Bendo beserta staff yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk belajar melayani di gereja dengan latar belakang Jawa.
- Rekan-rekan PT. Natural Nusantara, Bpk. Sindhu, Mas. Alan, dan semua kawan-kawan yang senantiasa memberi banyak tambahan ilmu....SEMANGAT PAGI...
- Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana..I Love you all....
- Teman-teman kost...Leo, Hendy, Somad, Putu, Ari, Indra, Nuning...terima kasih atas semua tawa dan keceriaan...God Bless all of you..
- Tetah Neneng Sunenti, Yayan, Tio, Dandi...karyawan burjo yang senantiasa menjadi tempat berbagi paling asik...semoga berkt Tuhan mengalir atas kalian...
- Mas Ade. Satu satunya karyawan yang penulis miliki...terima kasih kerja samanya...

Yogyakarta 25 November 2016

Bumi Mataram

Penulis

Riston Antonius Purede

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	ii
Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih	iii
Daftar Isi	v
Abstraksi	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
a.1. Urgensi Pembahasan Etika Politik	1
a.2. Gereja Pasca Konflik Sebagai Subjek Etika Politik	4
a.3. Memulai Sebuah Etika Politis Kristen	4
a.4. Teologi Dietrich Bonhoeffer sebagai mitra dialog bagi etika politik	6
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Kajian	10
E. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup	11
F. Metodologi Penelitian	12
G. Judul Tesis	13
H. Sistematika Penulisan	13
I. Kerangka Teori	13
I.1. Pengertian Etika Politik	14
I.2. Konseptual Model Etika Politik	14
BAB II Corak Etika Politik dalam Teologi Dietrich Bonhoeffer	17
A. Pendahuluan	17
B. Bangunan Teologi Dietrich Bonhoeffer	19
b.1. Aspek Keyakinan Dasar	19
b.1.1. Karakter Allah	20
b.1.2. Hakikat Manusia	22
b.1.3. Pengampunan dan Pemuridan	26
b.1.4. Kemungkinan Etika Yesus menjadi Etika Publik	29

b.1.5. Misi Gereja	31
b.2. Aspek Gairah/ Loyalitas Bonhoeffer	32
b.2.1. Pengalaman Yang Menumbuhkan Keberpihakan	32
b.2.2. Keberpihakan Kepada Persekutuan Kristen	35
b.2.3. Keberpihakan Pada Dunia	36
b.3. Aspek Persepsi	37
b.3.1. Persepsi Tentang Otoritas	38
b.3.2. Persepsi Tentang Ancaman	39
b.3.2.1. <i>Order of Creation</i>	39
b.3.2.2. Dualisme Dunia	40
b.3.2.3. Anugerah Yang Murah	41
b.3.3. Persepsi Tentang Perubahan Sosial	42
b.3.3.1. Perdamaian Sebagai Perintah Allah	42
b.3.3.2. Tiga Alternatif Tindakan Gereja	43
b.3.4. Persepsi tentang Keterbukaan dan keberagaman	44
b.4. Aspek Penalaran Moral	46
b.4.1. Realitas Sebagai Dasar	46
b.4.2. Pengaruh Keyakinan Dasar	47
b.4.3. Langkah Penalaran Moral	47
C. Kesimpulan	48
c.1. Sistem Berpikir Bonhoeffer	48
c.2. Spiritualitas Keberpihakan	50
c.3. Perspektif Politis Bonhoeffer	50
c.4. Tujuan, Sarana, Aksi Politis dalam perspektif Bonhoeffer	52
BAB III Kecenderungan dan Perilaku Politis Gereja Pasca Konflik	54
A. Pendahuluan	54
B. Deskripsi	56

b.1. Kecenderungan-kecenderungan Gereja Pasca Konflik	56
b.1.1. Mekanisme Memendam Ingatan Konflik	56
b.1.2. Kepastian Penegakan Hukum.....	57
b.1.3. Sikap Tokoh Masyarakat Sesuai Eskalasi	58
b.1.4. Konflik sebagai resiko iman dan hasil ketidak-taatan	58
b.1.5. Rekonsiliasi Berawal dari Korban	59
b.1.6. Tindak Kriminal dipandang sevagai bentuk Provokasi.....	60
b.2. Deskripsi Etika Politik Gereja Pasca Konflik	60
b.2.1. Aspek Keyakinan Dasar	61
b.2.1.1. Penghayatan akan karakter Allah.....	61
b.2.1.2. Hakikat Manusia.....	61
b.2.1.3. Kemungkinan Etika Yesus dalam ranah publik.....	62
b.2.1.4. Penghayatan Akan Misi Gereja.....	63
b.2.2. Aspek Persepsi Jemaat	65
b.2.2.1. Persepsi ancaman dan “apa yang salah”.....	65
b.2.2.2. Persepsi akan Otoritas.....	67
b.2.2.3. Persepsi akan Strategi Perubahan Sosial.....	68
b.2.2.4. Persepsi akan Keberagaman dan keterbukaan.....	68
b.2.3. Aspek Loyalitas Jemaat.....	70
b.2.3.1. Loyalitas Pada Pribadi, Mentor atau kelompok Tertentu.....	70
b.2.3.2. Loyalitas pada Praktek atau kebiasaan tertentu	72
b.2.3.3. Loyalitas pada Allah	72
b.2.4. Aspek Penalaran Moral Jemaat	74
b.2.4.1. Definis mengenai “ baik”.....	74
b.2.4.2. Pengambilan keputusan moral	75
b.2.4.3. Keyakinan Dasar yang Berpengaruh.....	75
C. Analisis dan Tanggapan.....	76
c.1. Analisis dan tanggapan terhadap kerangka teori etika politik.....	77
c.1.1. Variabel Tujuan Primer	78
c.1.2. Variabel Gambaran kondisi Ideal Komunitas Sosial.....	79
c.1.3. Variabel Metanarasi Dominan	80
c.2. Analisis dan Tanggapan terhadap Tujuan Politis.....	81
c.3. Analisis dan Tanggapan terhadap Sarana Politis	82
c.4. Analisis dan Tanggapan terhadap aksi-aksi Politis	83
c.5. Analisis dan Tanggapan terhadap efek Politis	84
D. Kesimpulan dan Penutup	85

BAB IV Pertemuan Dua Konteks	87
A. Pendahuluan	87
B. Deskripsi.....	88
b.1. Deskripsi Kesimpulan.....	88
b.1.1. Deskripsi Kesimpulan Etika Politik Bonhoeffer	88
b.1.2. Deskripsi Kesimpulan Etika Politik Gereja Pasca Konflik	92
b.2. Deskripsi Dialog Etika Politik.....	95
b.2.1. Dialog Dalam Aspek Keyakinan Dasar	95
b.2.1.1. Karakter Allah	95
b.2.1.2. Hakikat Manusia.....	97
b.2.1.3. Kemungkinan Etika Yesus dalam Ranah Publik.....	98
b.2.1.4. Misi Gereja	100
b.2.2. Dialog dalam Aspek Persepsi	101
b.2.2.1. Persepsi akan Otoritas.....	101
b.2.2.2. Persepsi akan Ancaman.....	102
b.2.2.3. Persepsi akan Strategi Perubahan Sosial.....	104
b.2.2.4. Persepsi akan Keberagaman dan Keterbukaan.....	106
b.2.3. Dialog Dalam Aspek Loyalitas.....	107
b.2.4. Dialog Dalam Aspek Penalaran Moral	110
C. Analisis dan Tanggapan.....	114
c.1. Analisis dan Tanggapan terhadap Tujuan Politis	114
c.2. Analisis dan Tanggapan terhadap Sarana Politis	115
c.3. Analisis dan Tanggapan terhadap Aksi Politis.....	117
c.4. Analisis dan Tanggapan Terhadap Efek Politis	118
D. Kesimpulan Pembahasan Dialog	119
 BAB V Kesimpulan dan Kemungkinan Pengembangan	 122
A. Pendahuluan	122
B. Pembelajaran dari Dialog Etika Politik	125

b.1. Deskripsi Nilai-nilai Dominan	125
b.1.1. Nilai Penerimaan	125
b.1.2. Nilai Tanggung Jawab	126
b.1.3. Nilai Pelayanan	126
b.1.4. Nilai Komitmen	127
b.1.5. Nilai Keberagaman	127
b.1.6. Nilai Perdamaian	128
b.1.7. Nilai Kebersamaan	128
b.2. Deskripsi Moralitas Dominan	128
b.2.1. Moralitas Secitra denga Pencipta	129
b.2.2. Moralitas Pelaku sekaligus Korban	129
b.2.3. Moralitas Pemuridan	130
b.3. Kemungkinan Etika Politik Rekonsiliasi	131
b.3.1. Prinsip-prinsip Rekonsiliasi	131
C. Catatan Akhir	134
DAFTAR PUSTAKA	135
Deskripsi Hasil Wawancara	139

ABSTRAKSI

(Abstraction)

Pertanyaan terbesar dari setiap etika politik makro adalah bagaimana agar setiap kemajemukan kepentingan yang timbul dalam masyarakat dapat dikelola dengan baik bagi kemajuan, kesejahteraan dan kehidupan bersama. Sedangkan pertanyaan terbesar dari setiap etika politik mikro adalah bagaimana saya sebagai individu dapat hidup bersama orang lain dalam masyarakat dengan baik. Pertanyaan dalam etika politik mikro inilah yang menurut penulis harus diberikan porsi lebih dalam etika politik Kristen. Persolan tersebut ternyata menuntut kita untuk memikirkan mekanisme seperti apa yang membuat kita sampai pada jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan tersebut, sehingga tidak terburu-buru sampai pada sebuah “Tips & Trik” etika politis. Hal ini bagi penulis menjadi hal yang penting mengingat gereja-gereja di Indonesia menunjukkan beberapa gejala pragmatisme dan lebih membangun jalan ke arah kekuasaan dari pada membangun relasi kepada mereka yang miskin dan tertindas.

Dalam tulisan sederhana dan penuh kelemahan ini, penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan meneliti seperti apa etika politis Kristen dengan sampel kondisi jemaat pasca konflik dan mendialogkannya dengan etika politik dari teolog Dietrich Bonhoeffer yang juga berada situasi politik kemasyarakatan yang tidak kalah pelik. Tulisan ini kemudian menemukan bahwa hasil dialog antara etika politis yang seolah-olah “populer” (Jemaat Pasca Konflik) dengan etika politik yang seolah-olah aristokrat dari Bonhoeffer, justru melahirkan prinsip-prinsip yang menurut penulis dapat dijadikan sudut pandang baru bagi etika politis gereja di Indonesia. Dengan konseptual model yang memperhatikan dengan serius aspek keyakinan dasar, aspek persepsi, aspek loyalitas, aspek penalaran moral, etika politik dapat direkonstruksi dengan lebih sistematis. Etika politik yang dihasilkan menurut penulis justru perlahan-lahan mempengaruhi apa yang menjadi kepentingan masyarakat pada akhirnya.

Kata Kunci : Mikropolitik, Dialog, Konflik, Keberpihakan, Etika Kristen, Pragmatisme, Gereja, rekonsiliasi, Politik.

ABSTRAKSI

(Abstraction)

Pertanyaan terbesar dari setiap etika politik makro adalah bagaimana agar setiap kemajemukan kepentingan yang timbul dalam masyarakat dapat dikelola dengan baik bagi kemajuan, kesejahteraan dan kehidupan bersama. Sedangkan pertanyaan terbesar dari setiap etika politik mikro adalah bagaimana saya sebagai individu dapat hidup bersama orang lain dalam masyarakat dengan baik. Pertanyaan dalam etika politik mikro inilah yang menurut penulis harus diberikan porsi lebih dalam etika politik Kristen. Persolan tersebut ternyata menuntut kita untuk memikirkan mekanisme seperti apa yang membuat kita sampai pada jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaan tersebut, sehingga tidak terburu-buru sampai pada sebuah “Tips & Trik” etika politis. Hal ini bagi penulis menjadi hal yang penting mengingat gereja-gereja di Indonesia menunjukkan beberapa gejala pragmatisme dan lebih membangun jalan ke arah kekuasaan dari pada membangun relasi kepada mereka yang miskin dan tertindas.

Dalam tulisan sederhana dan penuh kelemahan ini, penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan meneliti seperti apa etika politis Kristen dengan sampel kondisi jemaat pasca konflik dan mendialogkannya dengan etika politik dari teolog Dietrich Bonhoeffer yang juga berada situasi politik kemasyarakatan yang tidak kalah pelik. Tulisan ini kemudian menemukan bahwa hasil dialog antara etika politis yang seolah-olah “populer” (Jemaat Pasca Konflik) dengan etika politik yang seolah-olah aristokrat dari Bonhoeffer, justru melahirkan prinsip-prinsip yang menurut penulis dapat dijadikan sudut pandang baru bagi etika politis gereja di Indonesia. Dengan konseptual model yang memperhatikan dengan serius aspek keyakinan dasar, aspek persepsi, aspek loyalitas, aspek penalaran moral, etika politik dapat direkonstruksi dengan lebih sistematis. Etika politik yang dihasilkan menurut penulis justru perlahan-lahan mempengaruhi apa yang menjadi kepentingan masyarakat pada akhirnya.

Kata Kunci : Mikropolitik, Dialog, Konflik, Keberpihakan, Etika Kristen, Pragmatisme, Gereja, rekonsiliasi, Politik.

BAB 1

PENDAHULUAN

“Sketsa Tujuan, Urgensi Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan “

A. Latar Belakang Permasalahan

a.1. Urgensi Pembahasan Etika Politik

Pragmatisme adalah alasan utama yang menurut penulis menjadi warna politis dominan gereja saat ini. Pragmatisme yang penulis maksudkan adalah pandangan yang mementingkan kegunaan, keuntungan, keberhasilan, profit dari apa yang ada sekarang untuk saat ini tanpa upaya pengembangan dan peningkatan.¹ Pendekatan ini sekedar melihat keuntungan praktis, hasil langsung yang dapat dimanfaatkan, tujuan jangka pendek, dan tanpa hal-hal luhur atau ideal. Pendekatan ini mengajak individu untuk bertanya tentang nilai tunai (*cash value*) dari segala sesuatu dengan titik berangkatnya adalah diri sendiri atau golongan sendiri. Kekuasaan yang didekati dengan pendekatan pragmatisme, tentu berpotensi pada ketidak-adilan. Pragmatisme kekuasaan inilah yang menggambarkan urgensi etika politik dalam bingkai politik gereja, etika politik yang mau mengarahkan pada hidup baik bersama orang lain dalam kerangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi yang lebih adil.

Beberapa teolog sudah mencium aroma ini dalam laku politik gereja. E. Gerrit Singgih dalam beberapa tulisan, mencoba mencermatinnya. Persoalan utama yang digambarkan Singgih diistilahkan dengan “*Minority Complex*”. Hal ini menggambarkan kecenderungan mental yang menganggap diri minoritas dan takut karena status tersebut. Mentalitas inilah yang melahirkan politik “Kristen mayoritas” dalam gereja-gereja di Indonesia. Corak politis ini berusaha agar gereja selalu dekat dengan kekuasaan atau memiliki hubungan harmonis dengan penguasa.² Gereja tampil dalam gambaran diri mayoritas padahal gereja harus sadar dan menerima statusnya sebagai minoritas. Gambaran diri mayoritas inilah yang membuat gereja tampil menjadi “anak manis” pemerintah dan tidak pernah memberikan sumbangan pemikiran kritis bagi pemerintahan. Bahkan gereja pasti menerima dengan baik segala kebijakan pemerintah. Hasilnya gereja lebih memperhatikan jembatan

¹ Paulus Budi Kleden, SVD, *Teologi Terlibat: Politik & Budaya dalam terang Teologi*, (Maukere: Penerbit Ledalero, 2003), p. 122

² Emmanuel Gerrit Singgih, “Dasar Teologis Kegiatan Politis Orang Kristen di Indonesia Mengikuti Pemilu 2004” dalam *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), p. 165

antara gereja dengan kekuasaan dan melupakan jembatan antara gereja dan rakyat (keberpihakan). Selain itu, tema kebangsaan- nasionalisme yang terlalu ditekankan justru mematikan sumbangan, kritik, dan wacana khas Kristen dalam partisipasi dan kritik bagi Negara. E. Gerrit Singgih berpendapat bahwa hal ini justru disukai oleh gereja-gereja, karena pemikiran-pemikiran Kristen kini memiliki sebuah kendaraan yang baik yaitu nasionalisme. Pemikiran etika politik Kristen kemudian hampir selalu berwarna nasionalisme, karena hanya dengan semangat nasionalisme gereja-gereja dapat aman, terbebas dari ancaman pembentukan Negara Islam dan kewajiban memberlakukan syariat Islam serta ketakutan akan diskriminasi yang mungkin diterima orang Kristen.³ Upaya pragmatis menjadi anak manis yang cukup puas dengan nasionalisme, membuat gereja tidak memiliki andil bagi transformasi kehidupan berbangsa.

Hampir senada, Paulus Widjaja juga menyoroti persoalan ini dengan kecurigaan besar terhadap teologi politis gereja yang berwarna teologi sukses.⁴ Bagi Widjaja, ada kecenderungan gereja gelisah jika dalam percaturan politik tidak ada tokoh legislatif Kristen, termasuk juga gelisah untuk menentukan siapa yang dapat menjadi pintu bagi Gereja pada kekuasaan. Gereja takut tidak bisa mempengaruhi politik di Indonesia menurut ideologi gereja, karena dengan demikian gereja tidak bisa mempengaruhi masyarakat secara umum.⁵ Asumsinya, jika wakil Kristen hilang di ranah politik praktis, maka kekristenan tidak bisa bersuara banyak dan lama kelamaan aspirasi dan keluhan serta tuntutan gereja tidak akan digubris lagi dan jadilah gereja warga kelas dua. Ketika tokoh Kristen muncul, gereja seperti “latah” menyuarakan dukungannya dengan sporadis tanpa dengan kritis dan bijak menilai tokoh Kristen tersebut. Kecenderungan ini menunjukkan obsesi kesuksesan dalam wilayah politik praktis yang coba di raih melalui *broker-broker politik* beragama Kristen. Obsesi ini menurut Widjaja disebabkan oleh pemahaman berkat Tuhan yang keliru, pragmatisme naif, dan optimisme berlebihan akan peran Negara.⁶ Konsep berkat Tuhan dipahami secara langsung dengan ada tidaknya kesuksesan, termasuk kesuksesan gereja atau tokoh-tokoh gereja dalam politik. Sebab yang kedua adalah pragmatisme, yang menilai keberhasilan gereja memenuhi panggilannya dari efektifitasnya dalam mempengaruhi atau merubah masyarakat sesuai nilai-nilai kekristenan atau

³ Emmanuel Gerrit Singgih, Ph. D, “Etnisitas, Kebangsaan dan Gereja: Pergumulan Kristen di Indonesia pada Awal Abad 21, dalam *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), p. 135

⁴ Paulus S. Widjaja, “Membangun Teologi Politis di Indonesia: Dari Teologi sukses kearah Teologi Pelayanan dan Doksologi” dalam Jurnal Teologi “GEMA”, (Jogjakarta: Duta Wacana University Press, 2004), p. 49-63

⁵ Paulus S. Widjaja, “Membangun Teologi Politis di Indonesia: Dari Teologi sukses kearah Teologi Pelayanan dan Doksologi”(2004), p. 50

⁶ Paulus S. Widjaja, “Membangun Teologi Politis di Indonesia: Dari Teologi sukses kearah Teologi Pelayanan dan Doksologi”(2004), p. 51

lebih tepatnya mengendalikan masyarakat. Sebab yang ketiga adalah optimisme berlebihan terhadap Negara, seolah-olah Negara bisa memberikan kedamaian sepenuhnya dan menyelesaikan semua persoalan setiap anggotanya, tetapi tidak menyadari bahwa Negara juga memiliki keterbatasan.

Tidak ketinggalan Saut Sirait dalam bukunya “ Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis” juga memberi pendapatnya tentang laku politik populer gereja.⁷ Sirait menyimpulkan bahwa laku politik gereja-gereja di Indonesia, bukan disebabkan oleh fenomena teologis seperti berkembangnya teologi sukses atau kejadian-kejadian politik yang baru terjadi. Bagi Sirait tingkah laku politik gereja-gereja Kristen yang “Istana sentris” disebabkan dan dibentuk oleh para penjajah yang menanamkan mentalitas seperti itu. Istana sentris dalam uraian Sirait adalah gambaran relasi yang berciri solidaritas vertikal yaitu solidaritas yang dibangun ke arah pemerintah. Kata solidaritas mengandung kesan bahwa gereja justru berpihak dan bersedia membela pemerintah, dari pada membangun solidaritas horizontal kepada mereka yang lemah secara sosial.⁸ Bagi Sirait tingkah laku para zending yang mengabarkan injil tetapi juga membiarkan penjajahan dengan segala akibat moral dan sosialnya secara langsung menunjukkan sebuah teologi yang seolah-olah menggambarkan kekuasaan ilahi yang identik dengan kekuasaan Negara. Gereja tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang menggambarkan absolutisme kaum penjajah, termasuk teologi yang justru berkebalikan dari posisi politik-teologis dalam Alkitab. Kebingungan terjadi ketika Indonesia merdeka dan tidak punya landasan dan pegangan teologis bagi politik, hal ini membuat Gereja mengadopsi politik lama yang bersifat elitisme dengan orde ketertiban dan kapatuhan mutlak pada Negara.

Laku politik gereja yang populer terlihat lebih berpihak pada penguasa dari pada berpihak kepada rakyat, walaupun berbeda titik berangkat dan mungkin saling menanggapi, ketiganya mendorong gereja untuk kritis terhadap pemerintahan dengan masukan, kritikan bahkan mungkin peringatan kepada penguasa dan elite pemerintahan. Gereja juga didorong untuk melahirkan alternatif laku politik yang sesuai dengan teologi Kristen yang dilakukan dalam tataran praksis gereja, sehingga gereja tidak selalu menjadi anak manis atas nama nasionalisme. Gereja diajak untuk membentuk sebuah etika politik baru yang menjawab kebutuhan, tetapi lahir dan bersumber dari pemikiran-pemikiran dan teologi Kristen. Pragmatisme yang mulai hadir dalam gereja-gereja memperlihatkan

⁷ Saut Sirait. *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006)

⁸ Saut Sirait mengutip pendapat Ulrich Ducrow yang menguraikan kehidupan bangsa Israel dan monotheismenya kepada YHWH adalah bentuk perlawanan kepada solidaritas vertikal yang dianut oleh kerajaan-kerajaan Asia Barat Daya Kuno, monotheisme Israel justru menawarkan solidaritas yang berbeda, sebuah solidaritas yang horizontal kepada sesame yang tertindas dan paling lemah secara social...**Saut Sirait**, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), p. 238

bahwa etika politik gereja harus senantiasa menjadi kajian-kajian yang berkembang, karena terkadang tema etika politis atau teologi politis gereja hanya menjadi kajian menarik pada saat terjadi peristiwa politik besar di Indonesia.

a.2. Gereja Pasca Konflik sebagai Subjek Utama Etika Politik

Kajian etika politik seperti yang digambarkan di atas cenderung berangkat dari gereja yang telah mapan, baik dalam arti teologis maupun dalam arti praktis. Pendekatan ini melupakan bahwa titik berangkat etika politik haruslah gereja yang bergumul paling berat dalam situasi politik Indonesia saat ini. Etika politik Kristen harus berangkat dari gereja yang paling tertindas, paling terbuang, dan yang berhadapan langsung dengan situasi politis pelik, kekerasan masif dalam masyarakat yang majemuk, termasuk juga gereja-gereja korban politik tertentu. Trauma yang masih tersisa dari sejarah panjang konflik tersebut tentu saja menuntut upaya rekonsiliasi yaitu sebuah proses perdamaian yang fundamental, pencarian kebenaran, peradilan yang tegas, dan reparasi sosial.⁹ Hal ini menurut penulis menjadi alasan mengapa gereja pasca konflik menjadi lingkungan yang tepat bagi upaya politik. Gereja seperti inilah yang mengalami langsung akibat-akibat sosial karena rezim, kebijakan, dan warna politik tertentu adalah titik berangkat yang penulis yakini lebih tepat.

Gereja pasca konflik sebagai titik berangkat etika politik harus mulai membangun sebuah gereja dalam arti yang paling luas. Gereja pasca konflik bukan hanya harus membangun sebuah gedung baru atau anggota komunitas baru, tetapi juga teologi yang baru dengan konteks yang baru, etika politis yang baru dengan konteks relasi dan pengalaman yang baru, serta praksis pastoral yang baru. Oleh karena itu, penulis memilih gereja pasca konflik sebagai basis *microsetting* bagi lahirnya etika politis baru. Gereja pasca konflik perlu merancang kembali keseluruhan identitas dan eksistensinya dengan sumber dan metode yang sesuai keutamaan-keutamaan pewahyuan Allah dalam Yesus Kristus.

a.3. Memulai sebuah Etika Politik Kristen ?

Hal penting yang menurut penulis perlu diperhatikan dalam wacana etika politik adalah penggunaan warisan pemikiran para tokoh-tokoh teologi Kristen dalam menyusun sebuah etika politik untuk konteks Indonesia. Teolog-teolog besar kekristenan telah meletakkan dasar atau paradigma berpikir yang masih memiliki gema kuat sampai saat ini, tentu saja hal ini adalah sebuah langkah sederhana dalam upaya berteologi politik. Idealnya dalam berteologi politik, pemahaman akan konteks

⁹ John Campbell- Nelson, " Demokrasi Gadungan dan Demokrasi yang Sejati : Neraca Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru", dalam John Campbell-Nelson Dkk (Ed.), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*, (Makassar: Oase Intim, 2013), p. 55

perpolitikan di Indonesia yang menimbulkan keprihatinan iman coba didialogkan dengan Alkitab atau tradisi gereja untuk menghasilkan sebuah sintesa teologi politik kontekstual, akan tetapi kita bisa memulai dengan memeriksa warisan pemikiran-pemikiran para teolog-teolog abad sebelumnya untuk mendapatkan patokan-patokan etika politik dalam formasi-formasi teologi para raksasa teolog. Alasan penulis sederhana, persoalan atau diskursus teologi politik atau etika politik bukanlah sebuah tema baru dalam teologi, dan bukan diskusi yang mencuat saat modernitas atau saat konsep Negara demokrasi lahir ke muka bumi. Menurut penulis sejak dari awal gereja atau sejak Perjanjian Pertama orang percaya sudah harus dan terus-menerus berusaha mendefinisikan diri dalam menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah-masalah sosial yang muncul baik di dalam maupun di luar komunitas Kristen. Tidak ketinggalan juga seputar persoalan pertanyaan-pertanyaan politis seperti hakikat otoritas manusiawi dan kepatuhan terhadapnya. Dalam rentang sejarah, gereja telah menunjukkan sikap yang berbeda terhadap politik atau lebih tepatnya kepada kekuasaan. Sikap penolakan, kerjasama, menguasai, sampai memisahkan diri secara tegas adalah sikap-sikap yang pernah di ambil gereja yang bersumber dari perenungan dan refleksi terhadap teologi-teologi yang berkembang saat itu. Sehingga upaya belajar dari pengalaman para teolog yang telah terlebih dahulu bergumul dalam persoalan ini, menjadi sebuah pendekatan yang harus diupayakan dalam rangka mencari kerangka etika politik yang memadai.

Catatan penting yang terkadang terlupakan adalah diperlukan prasyarat-prasyarat tertentu yang muncul dari konteks saat ini, sebagai acuan untuk memilih dan menemukan tradisi pemikiran teolog mana yang bisa diambil sebagai bahan dasar. Dengan metode ini menurut penulis, kita bisa menjembatani jarak zaman yang terlampau jauh dengan konteks kita saat ini. Konteks yang dihadapi Gereja saat ini mengindikasikan beberapa hal yang menunjukkan kebutuhan-kebutuhan tertentu, dan tentu saja berbeda dengan kebutuhan dan tuntutan-tuntutan dalam konteks tradisi teologi lampau. Beberapa prasyarat yang penulis ambil dari konteks saat ini yaitu :

Pertama. Tradisi teologis tersebut harus menekankan jati diri orang-orang Kristen dalam sebuah konteks perubahan sosial. Identitas orang Kristen yang unik harus menjadi perhatian dalam konteks pragmatisme yang menjadi pendekatan umum dalam praksis politik saat ini. Teologi tersebut harus menekankan pemindaian makna dan memberi sumbangsih kepada rangkaian perubahan sosial, sehingga tidak semata-mata menimba ilham dari teks-teks klasik atau tingkah laku klasik tetapi dari realitas masa kini dan peluang-peluang masa depan.

Kedua. Teologi tersebut dilakukan bukan semata-mata dengan menyediakan ungkapan-ungkapan yang relevan bagi iman Kristen, melainkan terutama oleh tindakan-tindakan Kristen. Teologi yang menekankan aksi Kristen sebagai salah satu komponen utama teologi, dalam dunia yang berdosa dan juga struktur, tatanan serta sistem nilai yang juga ditaburi dosa. Tindakan Kristen yang mencegah gereja menjadi anak manis yang tidak berbuat apa-apa.

Ketiga. Teologi tersebut harus berkomitmen kepada perubahan sosial sesuai prinsip-prinsip Kristen dari sudut pandang kaum miskin dan kaum tertindas yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan “menantang” tentang Allah.

Keempat. Berangkat dari konteks yang pragmatis dan korup, teologi tersebut harus penuh kecurigaan terhadap konteks dan tatanan apapun itu. Teologi tersebut harus memberi penekanan terhadap upaya menantang dan memurnikan konteks. Oleh karena itu teologi adalah upaya mempelajari konteks dengan serius.

Kelima. Berangkat dari konteks modernitas, teologi tersebut harus menekankan injil yang kontras dengan dunia. Teologi yang menekankan kehidupan pemuridan sesuai injil yang menjadi alternatif cara menjalani hidup. Teologi ini tidak menolak dunia, tetapi kritis terhadap cara hidup dunia. Kelima prasyarat inilah yang harus diperhatikan untuk kemudian memilih corak teologis seperti apa yang relevan untuk konteks pasca konflik.

a.4. Teologi Dietrich Bonhoeffer sebagai Mitra dialog bagi lahirnya etika politik

Salah satu faktor yang membuat karya-karya teologi Dietrich Bonhoeffer begitu berharga adalah refleksi teologis yang berangkat langsung dari pengalaman keseharian dan pengumpulan politisnya. Upaya memahami cerita hidup Bonhoeffer adalah cara terbaik sampai pada pemahaman-pemahaman teologis-politisnya.¹⁰ Teologi Bonhoeffer yang terus berkembang terkadang membuat pembacanya memberi penilaian yang terlalu cepat terhadap karya teologinya. Teologinya pernah dipahami sebagai varian dari pemikiran *dialecticism* Karl Barth, kolaborator pemikiran-pemikiran demitologisasi Bultmann, bahkan pemikiran-pemikirannya sempat dipandang sebagai salah satu sumber referensi bagi teologi “*God is Dead*”.¹¹ Bagi penulis hal ini wajar terjadi karena Bonhoeffer tidak meninggalkan kita sebuah doktrin atau formasi teologi yang lengkap dan utuh tetapi justru

¹⁰ F. Burton Nelson, “*The Life Of Dietrich Bonhoeffer*” dalam John de Gruchy, (Ed.), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer*, (UK: Cambridge University Press, 1999), p. 22

¹¹ Ebenhard Bethge, *Dietrich Bonhoeffer: Man of vision, Man of courage*, (New York: Harper & Row Publishers, 1970), p.xx

mewariskan kita sebuah proses belajar yang aktif dan terus menerus berkembang, sebuah kenyataan yang membuatnya dikagumi tetapi sekaligus sulit dipahami.

Bonhoeffer juga dikenal sebagai tokoh gereja yang tergerak untuk terus menerus memperbaharui gereja. Bonhoeffer melihat dengan jelas bahwa kebutuhan pembaruan gereja Yesus Kristus tidak dengan mudah dilakukan begitu saja. Pembaharuan tersebut menurut Bonhoeffer memerlukan sebuah landasan spiritual yang mampu terus menggerakkan semangat perubahan tersebut, termasuk juga sebuah transformasi kesadaran iman (***prasyarat perubahan sosial***). Teologi bagi Bonhoeffer terpanggil kepada suatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mendesak, sesuatu yang oleh Heinrich Ott disebut “*an eminently practical significance, belonging to church politics in the widest sense*”.¹² Bonhoeffer mengajak gereja untuk berpolitik dalam pengertian yang seluas-luasnya, politik yang sesuai dengan keprihatian iman kontemporer.

Kecenderungan ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman Bonhoeffer menyaksikan penganiayaan orang-orang Yahudi di bawah rejim Nazi. Gereja Lutheran yang seolah-olah membiarkan kekejaman. Termasuk juga beberapa saat ketika ia tinggal di Bethel dan menyaksikan panti rehabilitasi menolong para korban kekejaman penguasa saat itu.¹³ Kegelisahan Bonhoeffer saat itu tergambar dalam penyatannya bahwa “*I must live through this difficult period of our national history with the Christian people of Germany, I shall have no right to participate in the reconstruction of Christian life in Germany after the war if I do not share the trials of this time with my people*”(***prasyarat keberpihakan terhadap kaum miskin dan tertindas***).¹⁴ Keseriusan Bonhoeffer dalam persoalan ini mendorongnya mendirikan seminari di Zingst dan Finkenwalde di mana para pastor diajarkan untuk melayani dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kristus dan tidak jatuh dalam degradasi moralitas seperti yang dialami oleh gereja dan Negara saat itu (***prasyarat keunikan dan kehidupan kontras jemaat***). Apa yang dilakukan Bonhoeffer secara diam-diam ini, menunjuk jelas kepada penulis bahwa Bonhoeffer adalah seorang politisi. Politisi yang penulis maksud adalah seseorang yang berpolitik, seseorang yang berupaya untuk menemukan, merumuskan dan mengatur apa yang mungkin. Seseorang yang dengan kekuasaan dalam arti tertentu berani melihat kemungkinan dan menangkap alternatif untuk perubahan.¹⁵

¹² Heinrich Ott, *Reality and Faith : The Theological Legacy of Dietrich Bonhoeffer*, (London: Lutterworth Press, 1966), p.12

¹³ Malcom Muggeridge, *A Third Testament: A Modern Pilgrims Eksplores the Spiritual Wanderings of Agustine, Blake, Pascal, Tolstoy, Bonhoeffer, Kierkegaard, and Dostoevski* (USA: Plough Publishing House, 2007), p. 108

¹⁴ Ibid, (2007), p.109

¹⁵ Paulus Budi Kleden, SVD, *Politik & Budaya dalam terang Teologi*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003), p.201

Beberapa karya Bonhoeffer juga dipandang melampaui bidang kajiannya. Salah satu contohnya adalah *Sanctorum Communio* yang mencoba menghubungkan teologi sistematika dengan sosiologi.¹⁶ Disertasi tersebut adalah penyelidikan dogmatis tentang sosiologi gereja, dan tentu saja orang akan bertanya apa kepentingan dan kompetensi dogmatika untuk masuk dalam daerah sosiologi. Bagi John de Gruchy tulisan tersebut lebih kepada penyelidikan tentang sifat persekutuan kekristenan, di mana Bonhoeffer mencoba menempatkan teologi dalam konteks hubungan-hubungan sosial dan etis dalam sejarah.¹⁷ Hal ini tentu saja mengundang ketertarikan penulis untuk melihat aspek-aspek sosial dalam teologi Bonhoeffer.

Corak etika Bonhoeffer juga menarik. Bonhoeffer menerima pendapat bahwa moralitas harus bersumber dari natur manusia, hanya saja natur manusia tidak pernah berdiri sendiri, natur manusia hanya ada dalam relasinya dengan Allah, dengan demikian moralitas juga mendapatkan otoritasnya dari Allah. *Natural order* sebagai sumber moralitas pasti berasal dari otoritas moral Allah, tidak berasal dari kebutuhan atau dorongan biologis natur manusia. Etika Bonhoeffer semakin terlihat berfokus pada penemuan kembali apa yang disebut sebagai natural yang secara langsung menunjuk pada pentingnya menemukan perintah atau kehendak Allah (*Divine Mandates*) dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, pemerintahan dan gereja. Robin W. Lovin berpendapat bahwa apa yang diungkapkan Bonhoeffer dengan corak etika seperti ini menunjukkan bahwa teologi seharusnya dituntut berangkat dari kesadaran akan kehadiran Allah dalam sejarah dan dalam struktur sosial yang sedang terus menerus kita pahami. Hanya dengan cara ini realitas dunia juga menjadi realitas Allah.¹⁸ Artinya realitas tidak semata-mata batasan-batasan alamiah dan struktur manusia yang telah ditentukan Allah. Bagi Bonhoeffer realita termasuk juga fakta Kristus yang pada satu titik berinkarnasi dalam sejarah manusia dan Kristus mengambil bentuk dalam sejarah kita secara keseluruhan. Selain itu Bonhoeffer mencoba untuk mengidentifikasi berbagai sistem yang ada di sekitar manusia dan yang mengatur hidup manusia, serta memandang etika pada prinsipnya adalah sebuah proses saling bekerja sama dalam fungsi-fungsi yang sesuai dan layak terhadap sistem-sistem yang menunjang kehidupan manusia tersebut.¹⁹ Artinya bagi Bonhoeffer etika adalah upaya agar fungsi-fungsi dalam sebuah sistem sosial dapat bekerja dengan semestinya, fungsi etika adalah mengatur keselarasan sistem-sistem dalam kehidupan manusia. Keselarasan tersebut hanya terjadi

¹⁶ John de Gruchy, *Saksi Bagi Kristus : Kumpulan Cuplikan Karya Dietrich Bonhoeffer*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), p.4

¹⁷ John de Gruchy, *Saksi Bagi Kristus : Kumpulan Cuplikan Karya Dietrich Bonhoeffer*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), p.5

¹⁸ Robin W. Lovin, *Christian Faith And Public Choices : The Social Ethics Of Barth, Brunner, and Bonhoeffer*, (Philadelpia: Fortress Pres, 1983), p. 16

¹⁹ Robin W. Lovin, *Christian Faith And Public Choices : The Social Ethics Of Barth, Brunner, and Bonhoeffer*, (Philadelpia: Fortress Pres, 1983), p. 126

dalam kehendak Allah, dengan kata lain bagi Bonhoeffer, etika adalah upaya menemukan dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam situasi dan konteks saat ini.

Bonhoeffer memulai pemikiran tentang moralitas dengan mengkritisi pertanyaan utama dari semua cabang pemikiran etika, yaitu “*How can I be Good*” dan “*How Can I do Good*” maksudnya tegas bahwa diri saya harus menjadi baik dan dunia harusnya menjadi baik melalui tindakan baik saya.²⁰ Tetapi pertanyaan ini tidak disetujui oleh Bonhoeffer dengan alasan bahwa sesuatu yang baik selalu tergantung pada realitas tertentu. Bagi Bonhoeffer pertanyaan etika harusnya adalah “*What is the will of God*” tujuannya jelas agar realitas Allah harus dinyatakan di manapun sehingga menjadi *the ultimate reality*. Bagi Bonhoeffer Allah menunjukkan dirinya untuk menjadi standar kebaikan. Standar kebaikan hadir dalam karya Allah yang mencipta, memelihara, mendamaikan dan menebus. Tanpa realitas ini atau referensi kepada *the ultimate reality* ini semua aturan, hukum dan moralitas hanya sekedar sebuah abstraksi belaka.²¹ Akan tetapi perlu diperhatikan walaupun kesannya bagi Bonhoeffer persoalan etika atau lebih tepatnya etika Kristen sederhana respon ketaatan kepada firman Allah, hal ini tidak selalu mengindikasikan bahwa firman itu selalu terang dan jelas atau mudah disadari. Ketaatan kepada kehendak Allah juga tidak mengindikasikan bahwa norma tindakan baik itu sederhana dan satu.

Bagi Bonhoeffer pertanyaan tentang apa yang baik, ditransformasikan menjadi pertanyaan bagaimana saya hidup dalam upaya partisipasi dalam *divine reality* yang terungkap dalam Kristus. Sesuatu yang baik tidak harus direduksi dalam sebuah penjelasan akan motif yang mendasarinya, bukan juga konsekuensi atau hasil dari tindakan tersebut. Bagi Bonhoeffer sesuatu yang baik bukan terletak pada motifnya, metode perilakunya atau hasil dari keputusan etis tertentu.²² Artinya sesuatu yang baik ditentukan oleh kesesuaian tindakan itu dengan karya Allah dalam Yesus Kristus. Lebih lanjut Bonhoeffer memahami bahwa dalam Yesus Kristus, Realitas Allah bertemu dengan realitas duniawi. Jadi untuk memahami baik realitas Allah maupun realitas dunia, Yesus Kristus adalah referensi yang tepat. Dalam Kristus kita ditawarkan kemungkinan untuk ikut serta dalam realitas Allah dan dalam realitas dunia, tetapi perlu dicatat Bonhoeffer tidak memisahkan antara realitas Allah dengan realitas dunia. Kita bisa memahami realitas Allah dengan ambil bagian secara otentik dalam realitas dunia.²³

²⁰ Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, (New York: The Macmillian Company, 1955), p.55 perlu ditekankan apa yang coba diungkapkan ini adalah hasil pemahaman Bernhard Bethge sahabat Bonhoeffer yang mengumpulkan surat-surat Bonhoeffer dan sering disebut orang yang paling mengerti Bonhoeffer, dalam pandangan saya apa yang Bethge ungkapkan adalah interpretasinya terhadap pemahaman Bonhoeffer.

²¹ Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, (New York: The Macmillian Company, 1955), p.56

²² Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, (New York: The Macmillian Company, 1955), p.58

²³ Dietrich Bonhoeffer, *Ethics*, (New York: The Macmillian Company, 1955), p.61

Secara sederhana Bonhoeffer ingin mengatakan bahwa realitas dunia ini adalah realitas Allah, karena Allah telah masuk dan menjadi bagian dunia. Dapat penulis simpulkan teologi Dietrich Bonhoeffer memenuhi semua kriteria dan prasyarat yang sudah penulis sebutkan dalam bagian sebelumnya.

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana proses terbentuknya sebuah etika politis dalam konteks pasca konflik dengan metode dialog antara etika politik gereja pasca konflik dengan etika politik dari teologi Dietrich Bonhoeffer. Kajian ini akan meneliti bagaimana etika politik gereja pasca konflik Poso terbentuk, bagaimana etika politik Dietrich Bonhoeffer dan seperti apa jika kedua etika politik ini saling berdialog. Hipotesis penulis adalah corak etika politis Dietrich Bonhoeffer relevan dengan konteks gereja pasca konflik. Etika politik Dietrich Bonhoeffer menurut penulis dapat dengan mudah diaplikasikan untuk menjadi etika politis gereja pasca konflik. Agar pertanyaan dan proses tersebut dapat terurai dengan baik penulis membaginya dalam beberapa pertanyaan penuntun yaitu :

1. Seperti apa corak etika politis Dietrich Bonhoeffer yang tergambar dalam teologinya.
2. Seperti apa corak etika politis gereja pasca konflik dalam hal ini Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Pniel Lombogia, Poso Sulawesi Tengah.
3. Sejauh mana dialog yang terjadi antara kedua corak etika politis ini, dengan tetap menitik beratkan relevansi pada konteks pasca konflik.
4. Seperti apa etika politik hasil dialog tersebut dan kemungkinan arah pengembangannya.

C. Tujuan Penelitian dan Pembahasan

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian dan kajian ini antara lain :

1. Memahami corak etika politis Bonhoeffer sebagai alternatif pendekatan etika politik
2. Memahami dan menilai apakah kerangka teori yang penulis gunakan efektif dan relevan
3. Memahami corak etika politis jemaat pasca konflik Poso.
4. Memahami dan menilai sejauh mana metode dialog antara dua corak etika politis dapat membantu melahirkan etika politis yang lebih relevan.
5. Membawa gereja pasca konflik dalam diskursus etika politis Kristen di Indonesia.

D. Manfaat Kajian dan Penelitian

Manfaat yang menurut penulis berpotensi di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Membuka kesadaran baru bagi gereja-gereja bahwa tradisi pemikiran teologi Kristen menawarkan sumbangan yang berharga bagi setiap bidang kehidupan manusia, bukan hanya sumbangan dalam bidang teologi.
2. Membuka kesadaran bagi gereja-gereja bahwa untuk dapat berperan secara politis dengan lebih baik, tidak harus melompat ke ranah lain dan memahami keseluruhan teori-teori politik, konsep dan teori tata Negara modern, tetapi bisa dengan menggunakan cara berpikir dan paradigma teologis sesuai tradisi kekristenan.
3. Memperkaya khazanah teologi dan etika politik bagi pengembangan sikap-sikap politis gereja yang relevan, aktif, kritis, dan bertanggung jawab
4. Membuka kesadaran teologis bahwa Gereja-gereja pasca konflik memerlukan penanganan serius terkait etika politik dalam konteks pengalaman konflik.
5. Membuka diskursus-diskursus selanjutnya terkait kemungkinan etika politik Kristen kontekstual, yang tidak hanya relevan dengan keadaan tetapi juga memasukan unsur-unsur budaya lokal dalam proses pembentukan etika politik Kristen.

E. Batasan masalah dan ruang lingkup

Etika politik pertama-tama bukanlah berupaya bagaimana supaya sebuah pemerintahan dapat berjalan dengan baik, atau kriteria-kriteria moral seperti apa yang harus dimiliki oleh *apparatus* Negara. Etika politik memang mempertanyakan tentang kekuasaan atau lebih tepatnya legitimasi etis kekuasaan, akan tetapi etika politik yang penulis maksudkan di sini bukan untuk membahas persoalan kekuasaan. Etika politik di sini lebih mengarah pada bagaimana Gereja menjalankan relasinya dengan penyusunan-penyusunan masyarakat dan kemudian berpartisipasi. Karena itulah maka pembahasan ini akan membahas tema corak politik dalam tataran mikro dan bagaimana Bonhoeffer dan Jemaat Pasca konflik membangun argumennya tentang etika politik. Inilah batasan masalah yang perlu diperjelas, oleh karena itu tulisan ini tidak akan berpretensi menghadirkan sebuah pedoman etika politik yang menyentuh seluruh aspek bagaimana mengatur sebuah Negara secara etis, tetapi hanya berusaha memberi alternatif pemikiran dari perspektif Kristen bagaimana sebuah cara hidup, cara berelasi, dan cara mempengaruhi lingkungan sosial demi perubahan sosial dipahami dan dikelola dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembahasan ini juga tidak membahas etika politik secara filosofi atau sebagai sebuah ilmu ketatanegaran. Pembahasan ini juga tidak akan sampai pada upaya pembahasan etika politik terkait tema-tema politik seperti hukum positif, hak asasi manusia, dan tema-tema politik tertentu. Kajian ini hanya akan berupaya menjawab pertanyaan bagaimana saya

dapat menjawab pertanyaan moralitas politik yaitu “ Bagaimana saya dapat hidup bersama orang lain dalam sebuah masyarakat dengan baik “, dengan kerangka kerja dan sistem berpikir seperti apa serta tidak melupakan perspektif Kristen.

F. Metodologi Penelitian

Penulis memakai metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan penelitian atau riset literatur. Dengan objek kajian karya-karya Dietrich Bonhoeffer sendiri sebagai sumber pertama dan juga tinjauan-tinjauan tokoh lain terhadap teologi Bonhoeffer sebagai sumber kedua. Dalam melakukan penelitian literature tersebut penulis akan dibantu oleh teori etika karakter holistik yang dikembangkan oleh Glen H. Stassen & David P. Gushee, untuk menemukan empat dimensi penting dalam etika yaitu gairah/loyalitas Bonhoeffer, persepsi Bonhoeffer, cara penalaran Bonhoeffer, dan keyakinan-keyakinan dasar Bonhoeffer.²⁴ Perlu penulis tekankan bahwa landasan teori yang penulis gunakan hanya untuk memetakan persoalan dan membuat permasalahan atau tema yang coba ditemukan dapat dilakukan dengan sebuah konseptual model yang jelas. Hasil penelitian akan didialogkan dengan hasil penelitian lapangan terkait kecenderungan laku politis Gereja pasca konflik dengan metode penelitian kualitatif dengan kerangka teori yang sama. Langkah-langkah penelitian yang akan penulis tempuh yaitu :

1. Meneliti tulisan-tulisan Dietrich Bonhoeffer dengan kerangka kerja yang sudah ditentukan untuk menemukan beberapa aspek etika politisnya.
2. Menemukan penjelasan dan uraian terkait variabel keyakinan dasar, aspek persepsi, aspek loyalitas, aspek penalaran moral dari teologi Dietrich Bonhoeffer.
3. Meneliti corak etika politis jemaat pasca konflik Poso Sulawesi Tengah dengan wawancara mendalam, menggunakan kerangka berpikir yang sama dengan penelitian literature Dietrich Bonhoeffer.
4. Menemukan penjelasan dan uraian terkait variabel keyakinan dasar, aspek persepsi, aspek loyalitas, aspek penalaran moral dari Jemaat pasca konflik.
5. Mendialogkan dan menilai etika politis keduanya, dengan orientasi konteks pasca konflik.

²⁴ **Glen H. Stassen & David P. Gushee**, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam konteks Masa kini*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2008),p. 54

G. Judul Tesis

Etika Politik Gereja Pasca Konflik *“Mendialogkan Dietrich Bonhoeffer dengan Gereja Pasca Konflik Poso”*

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian dan kajian akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan, landasan teori penelitian.

Bab II : Bagian ini akan berisi uraian hasil penelitian terhadap bentuk teologi Bonhoeffer dengan konseptual model yang pertama. Variabel-variabel pembentuk etika Bonhoeffer dan indikator-indikatornya akan menguraikan dengan lebih memadai aspek-aspek penting dalam teologi Bonhoeffer. Tujuan bagian ini untuk mendapatkan corak etika politik Dietrich Bonhoeffer.

Bab III : Bagian ini akan berisi uraian hasil penelitian terhadap corak laku politis Gereja pasca konflik Poso dengan sampel GKST Pniel Lombogia. Penelitian akan dilakukan dengan kerangka berpikir sesuai konseptual model yang penulis gunakan.

Bab IV : Bagian ini akan berisi dialog antara etika politik Bonhoeffer dengan etika politik Gereja pasca konflik. Dengan fokus pada menemukan tujuan, sarana, aksi, dan efek politis dari etika politik hasil dialog yang terjadi.

Bab V : Bagian ini berisi kesimpulan dan kemungkinan pengembangan yang tercermin dari dialog etika politik Bonhoeffer dengan Gereja pasca konflik.

I. Kerangka Teori

Kajian ini memakai beberapa kerangka teori. Kerangka teori utama adalah teori etika karakter holistik, sedangkan teori-teori lain hanya digunakan sebagai pelengkap. Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa kerangka teori yang digunakan.

I.1. Pemahaman Etika Politik

Sudah sedikit di singgung di uraian sebelumnya bahwa etika politik adalah sebuah penilaian kritis terhadap moralitas anggota masyarakat dan moralitas yang terkandung pada setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya pada suatu masyarakat atau Negara.²⁵ Defenisi ini memperlebar definisi yang membatasi dengan tegas bahwa etika politik adalah upaya etis untuk mempertanyakan prinsip-prinsip moral yang harus mendasari penataan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam definisi yang sempit etika politik hanya membahas prinsip-prinsip moral dasar yang mengatur dengan tegas bagaimana suatu masyarakat diatur dan dikelola oleh sekelompok orang yang mendapat mandate dari masyarakat untuk mengatur dan mengelola kepentingan bersama. Artinya, etika politik tidak akan membahas bagaimana kelakuan para politisi, tetapi lebih membahas bagaimana harkat dan martabat manusia/masyarakat dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan.²⁶ Definisi yang sempit ini perlu diperluas dengan memahami bahwa etika politik juga harus mengatur karakter dari individu-individu yang menjalankan prinsip-prinsip kenegaraan yang telah teruji baik secara moral. Bisa kita pahami bahwa bukan hanya prinsip dan tujuan yang harus memenuhi standar moralitas tertentu, tetapi cara dan oknum yang menjalankannya juga harus masuk dalam standar moral tertentu. Dengan demikian etika politik berkaitan bukan hanya dengan prinsip-prinsip legitimasi yang secara moralitas baik, tetapi juga menyangkaut bagaimana prinsip-prinsip itu dijabarkan dan siapa yang melaksanakannya harus memenuhi tuntutan moral tertentu agar keseluruhan sistem kenegaraan atau sistem kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Dapat penulis simpulkan bahwa etika politis yang penulis maksudkan adalah seperangkat kerja atau sistem berpikir yang membantu individu menjawab pertanyaan bagaimana saya dapat hidup bersama orang lain dalam masyarakat dengan baik.

I.2. Konseptual Model Etika Politik (Kerangka Teori Penelitian)

Glen H. Stassen & David P. Gushee dalam bukunya *Etika Kerajaan* menawarkan sebuah konsetual model bagi etika Kristen, mereka menyebutnya etika karakter yang holistik. Etika ini dibentuk oleh empat variabel dan keempat variabel tersebut dibentuk oleh beberapa indikator-indikator yaitu :

²⁵ Saut Sirait, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006),p. 39

²⁶ Franz Magnis Suseno, *ETIKA POLITIK: Prinsip-prinsip Moral dasar kenegaraan modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), p.xiii

Aspek yang pertama dari teori etika karakter holistik ini adalah aspek cara penalaran. Cara penalaran ini dipandang penting oleh Glen H. Stassen & David P. Gushee karena etika karakter menyiratkan suatu konsistensi dan konsistensi hanya bisa terjadi dengan penalaran yang logis. Penalaran inilah yang akan menghasilkan kebajikan, karena kebajikan mengarah pada memahami dan melakukan apa yang baik untuk tujuan hidup kita.²⁷ Variabel aspek penalaran dalam etika karakter ini dibentuk oleh beberapa indikator yaitu *penilaian langsung* (terhadap suatu perbuatan atau pribadi tertentu), *peraturan*, *prinsip*, dan terakhir adalah *keyakinan dasar*.²⁸ Aspek kedua dari teori pembentuk etika karakter holistik ini adalah dimensi keyakinan dasar. Dimensi keyakinan dasar adalah pendasaran etika karakter pada suatu narasi yang lebih besar dan lebih luhur, dalam hal ini sering dicontohkan dengan konsep kerajaan Allah yang menjadi dasar semua tindakan orang percaya, sama seperti yang diupayakan Yesus Kristus. Dimensi keyakinan dasar ini dibentuk oleh beberapa indikator. *Pertama*, bagaimana seseorang memahami karakter Allah. *Kedua*, bagaimana seseorang memahami akan natur manusia. *Ketiga*, bagaimana seseorang menghubungkan antara pengampunan dan pemuridan. *Keempat*, bagaimana seseorang memahami keserupaan dengan Kristus dan keserupaan dengan keadilan. *Kelima*, bagaimana seseorang memahami misi gereja.²⁹ Variabel selanjutnya dalam etika karakter adalah dimensi gairah atau loyalitas. Etika karakter selalu mempertanyakan pembentuk loyalitas, karena karakter selalu tumbuh dalam lingkup atau lingkungan tertentu yang menghasilkan gairah tertentu. Aspek gairah dan loyalitas dibentuk oleh beberapa indikator yaitu: *Pertama*, loyal pada *role model* tertentu sebagai pribadi yang kita pakai sebagai referensi bagi karakter kita. *Kedua*, loyalitas kepada aktifitas dan sarana yang kita gunakan untuk mencapai sasaran kita. *Ketiga*, loyalitas kita kepada komunitas tempat kita berkembang. *Keempat*, loyalitas kita kepada Allah sendiri.³⁰ Variabel selanjutnya adalah etika karakter adalah dimensi persepsi, artinya sebuah karakter dibentuk oleh persepsi pribadi tersebut terhadap data yang diterimanya, persepsi inilah yang membuat seseorang bisa bertindak berbeda dengan orang yang lain walaupun menerima data yang sama persis. Dimensi persepsi dibentuk oleh beberapa indikator yaitu : *Pertama*, asumsi akan kekuasaan dan otoritas. *Kedua*, persepsi akan ancaman. *Ketiga*, strategi untuk perubahan

²⁷ Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam konteks Masa kini*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2008),p. 55

²⁸ Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam konteks Masa kini*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2008),p. 110-118

²⁹ Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam konteks Masa kini*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2008),p. 56-57

³⁰ Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam konteks Masa kini*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2008),p. 61

social. *Keempat*, integritas informasi.³¹ Etika karakter holistic ini tentu sangat membantu memahami suatu corak etika tertentu oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui factor-faktor pembentuk dan variable-variabelnya sebagai konseptual model untuk memeriksa teologi Dietrich Bonhoeffer.

©UKDW

³¹ Glen H. Stassen & David P. Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam konteks Masa kini*, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2008),p. 65

BAB V

KESIMPULAN & KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN

“ Nilai-nilai, Moralitas, dan Rekonsiliasi “

A. Pendahuluan

Penulis mempercayai bahwa konteks politik di Indonesia adalah sesuatu yang hidup, dinamis, serta memerlukan arah, partisipasi, dan dukungan. Terbuka kemungkinan perspektif teologi Kristen atau lebih tepatnya etika-politik Kristen yang dihidupi oleh pribadi-pribadi Kristen dengan memupuk gairah, hasrat dan emosi-emosi akan prinsip dan keutamaan Kristen, dapat memberi bentuk dan arah yang baik terkait konteks politik Indonesia yang sedang dan terus menerus mencari bentuk. Umat Kristiani memiliki potensi untuk memberi arah pada konteks politik tersebut dengan membentuk kebudayaan-kebudayaan baru. Sebab apa yang kita kerjakan selalu terkait dengan kehidupan orang lain dan tentu saja menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru sebagai hasil perjumpaan. Berangkat dari hal tersebut menurut penulis kita perlu mempertimbangkan paradigma politik yang mengembangkan sebuah corak politik yang bermain dalam tataran mikro. Sebuah upaya politik yang bermula dari perubahan diri, perubahan cara melihat realitas, perubahan komunitas dan perubahan praksis sosial sesuai dengan keutamaan-keutamaan yang bersumber dari Ajaran Yesus, tetapi kemudian mempengaruhi, menginspirasi dan mentransformasi kondisi sosial sebagai sebuah bentuk atau metode berpolitik.¹⁵⁸ Dengan catatan metode tersebut tidak mengganggu hakikat dari gereja dan hakikat Negara itu sendiri.

Bentuk politik yang bisa diupayakan Gereja mengacu pada wilayah kegiatan yang memiliki pengaruh kepada publik dan membentuk arah kehidupan kolektif, tetapi bukan termasuk paradigma politik tradisional yang memandang perubahan sosial terjadi melalui *apparatus* Negara atau upaya “keras” dari rakyat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Aktifitas politik gereja sebaiknya tidak berkaitan dengan tindakan resmi atau tidak resmi dari presiden, parlemen, atau partai politik. Aktifitas politik gereja seharusnya tidak ditujukan kepada pemilihan-pemilihan atau apapun yang terkait agenda legislatif. Selama ini agen atau aktor politik yang berpengaruh besar justru sesuatu yang mendapat atensi besar masyarakat, seperti acara televisi, genre film populer,

¹⁵⁸ Metode yang sering disebut mikropolitik yang dipopulerkan oleh Gilles Deleuze dan Felix Guattari dalam karya mereka...Gilles Deleuze & Felix Guattari, *A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia*, (USA: The University of Minnesota Press, 1987).

perkumpulan-perkumpulan profesi, Gereja dan pelayanan ibadah (liturgy dan devosi), komunitas lingkungan dalam tataran akar rumput, serta Internet (media sosial).¹⁵⁹ Dengan kata lain, gereja sebagai salah satu subjek yang juga masih mendapat atensi masyarakat dapat memulai aktifitas politiknya untuk merubah kecenderungan masyarakat. Target utama dari pendekatan politik gereja adalah efek disiplin rohani, kondisi emosi masyarakat, suasana politis dan sensibilitas budaya dalam iman. Tujuan aktifitas politik ini adalah memperbaiki, memurnikan, mengintensifkan, atau mendisiplinkan emosi, dorongan moral dan menyebarkan suasana yang relevan dan memungkinkan program politik, afiliasi partai, komitmen ideologis dan preferensi kebijakan pada tataran politik yang lebih tinggi seperti politik dalam tataran legislatif atau daerah.¹⁶⁰ Pendekatan ini penulis yakini perlahan-lahan membuat lingkungan terkecil (*microsetting*) tempat individu berpartisipasi dapat berubah dan membantu menentukan kemungkinan-kemungkinan dan pilihan-pilihan untuk aktifitas politik yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih menggunakan kekuasaan (politik tradisional). Politik dalam makna yang seluas-luasnya sebagai tindakan yang menghasilkan perubahan pada masyarakat, dapat dipengaruhi secara mikro dengan aktifitas agama yang dapat mendisiplinkan tubuh dan mengembangkan karakter yang baik.

Politik secara simultan adalah sebuah relasi antara aktifitas politik akar rumput dan aktifitas politik elite. Berpolitik secara makro tanpa berpolitik secara mikro adalah sebuah usaha di permukaan tanpa menyentuh subjek sekaligus objek utama dari politik itu sendiri yaitu rakyat.¹⁶¹ Konteks politik Indonesia berawal dari budaya, kebiasaan, paradigma, imajinasi sosial yang berubah. Politik praktis sebagai sebuah instrument *apparatus* Negara, harus didukung oleh aktifitas dan budaya politik akar rumput dan menjadi budaya perubahan. Sebuah perubahan sebagai *social movement* bekerja dalam prinsip *molecular transformism* (transformasi pada tahap molekul kelompok sosial). Metode berpolitik yang mulai dengan menyadari aktifitas politik mikro dan memakainya untuk menghasilkan perubahan pada tataran makro adalah pilihan bijak. Politik pragmatis, politik uang, politik yang korup, dan politik identitas hanya puncak dari gunung es yang telah terbentuk dari lingkungan yang dihidupi setiap hari. Artinya, produk politik saat ini adalah hasil bentukan budaya masyarakat dan hanya bisa diperbaiki dengan membentuk budaya politik yang baru, yang santun dan manusiawi.

¹⁵⁹ Gilles Deleuze & Felix Guattari, *A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia*, (USA: The University of Minnesota Press, 1987).p.18

¹⁶⁰ Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012), p. 115...dengan judul asli Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, *Handbook of Political Theory*, (London: Sage Publication, 2004).

¹⁶¹ Gilles Deleuze & Felix Guattari, *A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizophrenia*, (USA: The University of Minnesota Press, 1987).p.213-214

Bagi penulis jika definisi politik umum yang kita pakai adalah aktifitas dengan mana kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam sebuah unit dan wilayah hukum tertentu diselaraskan, dengan membagikan kekuasaan dengan proporsional demi kesejahteraan dan kelanggengan bersama, maka upaya politik gereja tidak berurusan dengan bagaimana agar kepentingan tersebut bisa selaras dan dibagikan secara proporsional. Aktifitas politik gereja justru bergerak di wilayah yang memunculkan atau merangsang kepentingan-kepentingan seperti apa yang muncul tersebut. Sebuah kepentingan politis komunitas yang justru dipengaruhi keutamaan Kristus. Dengan mempengaruhi sumber-sumber budaya yang mendasari kepentingan-kepentingan tersebut, aktifitas politik pada taraf individu dan komunitas menurut penulis justru lebih memberi dampak dan arah yang nyata. Jika definisi politik yang kita pakai adalah seni untuk menemukan, merumuskan dan mengatur segala kemungkinan dalam kepentingan yang berbeda dengan sarana kekuasaan, maka politik gereja justru menyediakan kemungkinan-kemungkinan tersebut tanpa berusaha ikut campur dalam tugas legislatif untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut.¹⁶² Hal inilah yang menurut penulis harus diupayakan sebagai bentuk keterlibatan politik.

Etika politis hasil dialog antara Dietrich Bonhoeffer dengan Jemaat pasca konflik, sejauh yang penulis amati menampilkan beberapa hal menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal-hal penting yang penulis temukan dalam dialog tersebut akan penulis bagi menjadi dua kategori yaitu kategori nilai dan kategori moral. Upaya ini bertujuan untuk semakin jelas melihat etika politik yang relevan dalam konteks pasca konflik dan juga semakin memperjelas bukan hanya etika seperti apa yang harus dihidupi jemaat pasca konflik, tetapi juga nilai-nilai apa yang harus dipegang serta moralitas seperti apa yang menjadi padanan etika politik gereja pasca konflik. Bagi penulis, kajian etika tidak pernah lengkap tanpa memperhatikan nilai-nilai dominan dan moralitas utama, hanya saja perlu diperjelas terlebih dahulu makna dan cakupan nilai dan moralitas tersebut.

Nilai-nilai bisa dipahami sebagai sumber identitas yang membantu manusia memahami dan melakukan sesuatu yang telah diatur atau yang belum diatur dalam sebuah masyarakat. Nilai selalu berkaitan dengan sesuatu yang kita yakini dan setuju. Nilai dapat dipahami sebagai aspek *attitude*, sedangkan etika dipahami sebagai sebuah aksi, dan moralitas sebagai sesuatu yang diimani atau yakini (*belief*).¹⁶³ Secara sederhana nilai adalah apa yang kita anggap baik. Melakukan sesuatu bukan hanya sebuah pemenuhan kewajiban tetapi juga untuk mencapai sesuatu yang dipandang

¹⁶² Paulus Budi Kleden, SVD, *Teologi Terlibat : Politik & Budaya dalam Terang Teologi*, (Mauere: Penerbit Ledalero, 2003), p.91

¹⁶³ Lihat John Dalla Costa, *Ethical Imperatif*, (Massachusetts: Perseus Books, 1998), p.124

lebih baik, baik secara praktis maupun idealis.¹⁶⁴ Sedangkan moralitas atau moral yang penulis gunakan merujuk pada kualitas-kualitas perbuatan yang dilakukan manusia sebagai manusia. Tanggung jawab dan kewajiban manusia secara manusiawi. Kualitas keutamaan tertentu dipandang sebagai kualitas secara manusiawi, artinya yang melekat dalam eksistensinya sebagai seorang manusia. Bukan kualitas-kualitas yang melekat karena pekerjaan, status, atau peran tertentu dalam masyarakat.¹⁶⁵ Nilai dan moral dalam pengertian inilah yang akan penulis jadikan acuan untuk memeriksa etika politik hasil dialog tersebut. Setelah menemukan nilai dan moralitas apa saja yang terkandung dalam etika politis hasil dialog tersebut, penulis akan menganalisis seperti apa nilai dan moralitas tersebut jika dihadapkan pada tema rekonsiliasi sebagai kemungkinan pengembangan.

Penulis menyimpulkan kajian etika politis gereja pasca konflik dengan sebuah kemungkinan kajian selanjutnya. Alasan penulis bahwa kajian etika politik tidak berhenti sampai menemukan mekanisme berpikir seperti apa yang bisa membawa saya hidup bersama orang lain dalam masyarakat dengan baik, tetapi terus menemukan kajian-kajian mendalam lainnya, khususnya bila konteks masyarakat tersebut adalah pasca konflik. Kesimpulan dan penutup ini bisa menjadi pengantar untuk kajian-kajian selanjutnya, tetapi tidak lupa penulis akan memberikan beberapa masukan terkait metode berpikir yang penulis telah gunakan.

B. Pembelajaran dari Dialog Etika Politik

b.1. Deskripsi Nilai-Nilai dominan

Dalam dialog antara etika politik Dietrich Bonhoeffer dengan etika politik gereja pasca konflik, penulis menemukan beberapa nilai dominan. Nilai dominan tersebut tergambar dalam aspek-aspek pembentuk etika politis, dan terkadang dalam satu aspek terkandung beberapa nilai yang sama. Nilai-nilai dominan tersebut antara lain :

b.1.1. Nilai Penerimaan

Nilai penerimaan bersumber dari Allah yang menerima manusia dengan penuh kasih, selalu menolong manusia dan tidak pernah membalas kejahatan manusia. Nilai penerimaan inilah yang membuat jemaat pasca konflik dapat menahan diri untuk tidak membalas, dan menerima semua

¹⁶⁴ Penulis mengikuti pemahaman Max Sheler yang menilai bahwa dalam diskursus nilai terdapat nilai yang rendah dan nilai yang tinggi. Hierarki nilai ini membantu kita menentukan keputusan moral dengan lebih baik.

¹⁶⁵ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2003),p.14

hal yang menimpa mereka sebagai resiko iman. Nilai ini mengajarkan jemaat untuk seperti Allah yang menerima dengan penuh kasih. Walaupun masyarakat atau kelompok lain pernah melakukan yang jahat terhadap jemaat, jemaat harus tetap menerima mereka dengan penuh kasih, penuh pertolongan dan tidak membalas. Nilai penerimaan juga mengajak jemaat untuk melihat setiap pengalaman sebagai peluang bagi Allah untuk memelihara manusia. Dengan kata lain Allah memakai kelemahan dan kesalahan manusia untuk mewujudkan karya pemeliharaan, oleh karena itu setiap pengalaman pahit tetap harus diterima sebagai kemungkinan karya pemeliharaan Allah.

b.1.2. Nilai Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah nilai penting yang muncul dalam dialog. Bonhoeffer menekankan akan hidup yang bertanggung jawab serta disiplin pemuridan, sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan terhadap anugerah Allah yang mahal. Tanggung jawab ini lahir dalam relasi manusia dengan Allah. Sehingga hidup bertanggung jawab dapat dipahami bertanggung jawab terhadap karya pemeliharaan Allah, termasuk hidup tanpa kompromi dengan dosa. Nilai tanggung jawab ini, mengakomodir semua konsekuensi yang muncul karena relasi manusia dengan Allah. Termasuk juga nilai-nilai perdamaian sebagai perintah Allah. Nilai tanggung jawab ini juga menyentuh aspek pertanggung jawaban etis terhadap sesama, karena kepenuhan eksistensi manusia salah satunya ditentukan oleh sesama manusia. Nilai ini kemudian menyentuh pertanggung jawaban terhadap segala hal, termasuk bertanggung jawab terhadap konflik sosial yang sedikit banyak mengandung peran gereja di dalamnya. Nilai ini mengajak jemaat untuk tetap bertahan dalam wilayahnya dan berupaya merubah situasi sosial dan relasi sosial yang telah rusak karena konflik.

b.1.3. Nilai Pelayanan

Nilai pelayanan ini tidak semata-mata berkonotasi eklesial. Nilai pelayanan bersumber dari prinsip bahwa realitas yang dihidupi manusia adalah realitas Kristus sehingga etika Kristus harusnya menjadi etika umum. Nilai pelayanan inilah yang menjadi patokan etika kristus yang harus menjadi etika umum tersebut. Nilai pelayanan ini mengacu pada kerendahan hati, mau menolong, berpihak kepada mereka yang miskin, tertindas, dan termarginalkan. Nilai pelayanan ini mengakomodir semua nilai yang bersumber dari upaya untuk menemukan realitas kristus dalam dunia dan melayani Kristus. Nilai pelayanan ini juga mencakup upaya-upaya keadilan, terpanggil untuk merawat korban-korban masyarakat dan pemerintahan, dan berpihak pada mereka yang berjuang untuk keadilan. Nilai pelayanan ini menekankan peran manusia sebagai

pelaksana karya pemeliharaan Allah, sehingga acuan yang dipakai manusia adalah acuan yang Allah hadirkan dalam Yesus Kristus. Nilai pelayanan memang bermula dari pelayanan dalam komunitas jemaat, tetapi kemudian nilai ini mengajak jemaat untuk juga terbeban melayani masyarakat. Nilai pelayanan dalam gereja, mengarah pada transformasi individu dan pemuridan, sambil mengurangi pelayanan yang hanya bersifat hiburan semata.

b.1.4. Nilai Ketegasan Komitmen

Nilai ini bersumber dari upaya untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus. Nilai ketegasan ini mencakup sikap tanpa kompromi terhadap dosa, mampu melihat dan mengkritisi tatanan-tatanan masyarakat, dan berkomitmen terhadap perubahan sosial. Nilai ketegasan ini juga mencakup hidup dalam satu standar yang jelas yaitu standar Yesus Kristus. Ketegasan dan komitmen untuk hidup dalam satu acuan, menjadi pilihan politis yang berat karena terbentur banyak nilai lain seperti nilai kenyamanan dan nilai kemudahan hidup. Nilai ketegasan ini juga memungkinkan orang percaya mengambil tindakan-tindakan tegas yang perlu bagi keselamatan gereja dan kemanusiaan, tentu saja mengalami proses pergumulan dan analisis yang memadai sebelumnya. Nilai ketegasan bukan berarti menggantikan peran Allah, tetapi harus berasal dari keyakinan akan otoritas Allah yang mutlak. Nilai ketegasan ini, mengarahkan jemaat untuk kritis memeriksa setiap tatanan, termasuk gereja dengan teologinya, adat dengan peraturannya, dan pemerintahan dengan undang-undangnya.

b.1.5. Nilai keberagaman

Nilai keberagaman dan keterbukaan bersumber dari prinsip-prinsip Kristus. Nilai keberagaman ini tidak berhenti sampai pada penerimaan segala bentuk perbedaan. Nilai ini juga mengajak jemaat untuk mulai menilai dan memeriksa apakah dalam keberagaman tersebut terdapat kesamaan-kesamaan perjuangan. Nilai keberagaman menerima perbedaan ketika beberapa yang berbeda tersebut memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Acuan nilai ini adalah keutamaan-keutamaan Kristus karena bagi kristus jelas “siapa yang tidak melawan kita dia bersama kita, tetapi siapa yang tidak bersama Aku, ia melawan Aku “. Nilai keberagaman ini tidak berarti harus menolak dan melawan sesuatu yang berbeda orientasi “perjuangannya”, tetapi nilai keberagaman ini mengajak jemaat untuk berpihak pada tatanan berbeda tetapi dengan keprihatinan-keprihatian yang sama dengan keprihatinan-keprihatinan Kristus. Keberagaman jangan hanya berhenti pada perayaan keberbedaan, tetapi harus sampai pada pengenalan orientasi perjuangan. Inilah bentuk terbaik dari toleransi, menerima, mempelajari, menginspirasi, dan berpihak jika terdapat kesamaan orientasi.

b.1.6. Nilai Perdamaian

Nilai perdamaian ini mengacu pada karya Allah yang mendamaikan manusia dengan diriNya dalam Yesus Kristus. Nilai perdamaian ini tidak hanya berhenti pada hilangnya pertikaian, tetapi sebuah keadaan damai, tenang, harmonis karena Allah tidak nyaman dengan keadaan sebaliknya. Artinya, perdamaian ini harus dipahami sebagai upaya dan prakarsa Allah. Nilai perdamaian juga menyentuh aspek kebenaran dan keadilan. Damai berarti hadirnya kebenaran dalam masyarakat dan juga kehidupan bersama yang adil. Nilai perdamaian juga menyentuh aspek pengampunan dosa. Nilai perdamaian harus berada dalam upaya pengampunan dosa, demikian juga tidak ada perdamaian tanpa pengampunan dosa. Tentu saja nilai perdamaian ini harus berawal dari gereja. Gereja harus bertobat, mengaku dosa, berkomitmen untuk merubah diri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan.

b.1.7. Nilai kebersamaan

Nilai kebersamaan ini bersumber dari prinsip Gereja sebagai tubuh kristus yang baru. Nilai kebersamaan menggambarkan kekuatan sebagai sebuah komunitas pemuridan. Komunitas pemuridan yang juga menjadi wadah penalaran moral. Dengan kata lain nilai kebersamaan menyentuh juga aspek dimana keputusan-keputusan moral yang pribadi kini melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan moral. Nilai kebersamaan menekankan arti jemaat sebagai sesama murid Kristus. Setiap jemaat menjumpai sesama jemaat karena Kristus, karena Allah menghendaki manusia menemukan firman dalam kesaksian hidup sesama saudaranya. Nilai kebersamaan ini juga mengajak jemaat memahami bahwa antara jemaat dan komunitas lain adalah sesama, korban sekaligus pelaku. Dengan demikian semua anggota masyarakat punya hak dan tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

Ketujuh nilai inilah yang penulis temukan dalam etika politik hasil dialog dengan Dietrich Bonhoeffer. Nilai-nilai tersebut adalah nilai dominan yang mencakup beberapa nilai yang lebih sederhana.

b.2. Deskripsi Moralitas dominan

Selain nilai-nilai dominan, etika politik hasil dialog antara Dietrich Bonhoeffer dengan gereja pasca konflik juga menampilkan beberapa bentuk moralitas. Seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya, moralitas yang penulis maksudkan seperangkat perilaku baik yang dilakukan sebagai seorang manusia. Moralitas yang penulis maksudkan juga menyentuh penilaian sejauh mana etika

politik hasil dialog mengajak manusia hidup sesuai kualitas tertentu sebagai seorang manusia. Beberapa moralitas tersebut yaitu :

b.2.1. Moralitas Secitra dengan Pencipta

Moralitas ini mewarnai etika politik hasil dialog tersebut. Moralitas ini menekankan bahwa kehidupan manusia yang bermoral, tentu harus sesuai dengan Allah sebagai penciptannya. Semakin perilaku manusia sesuai dengan gambaran akan Allah, semakin baik kualitas manusia tersebut sebagai manusia. Pertanyaan yang pasti muncul adalah mengapa moralitas ini harus mengacu pada Allah sebagai pencipta, mengapa tidak mengacu pada manusia atau pada gambaran manusia biasa dengan kelemahan, kecenderungan, dorongan, dan keinginan yang betul-betul manusiawi. Mengapa mengukur kualitas manusia dengan acuan yang bukan manusia. Pertanyaan ini bisa dijawab dengan acuan Yesus Kristus sebagai manusia. Manusia Yesus Kristus menunjukkan kualitas-kualitas sebagai manusia, dan kualitas-kualitas tersebut hanya bisa terpenuhi dalam relasi dengan Allah pencipta. Etika Politik ini menunjukkan bahwa moralitas manusia hanya bisa terpenuhi jika moralitas tersebut terarah juga pada Allah. Manusia adalah gambaran diri Allah dan bukan gambaran produk buatan Allah, sehingga hanya dalam relasi dengan Allah manusia dapat menjadi manusia yang otentik. Etika politik kemudian berangkat dari manusia yang otentik. Pertanyaan selanjutnya bisa muncul. Apakah hanya moralitas yang terarah pada Allah pencipta yang dapat mengakomodir etika politik yang baik. Bagi penulis jelas, moralitas yang mengarah pada Allah dalam tataran praktis memudahkan manusia bertindak, karena hanya memiliki satu acuan yaitu gambaran Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Akan berbeda halnya, jika moralitas etika politik mengarah pada manusia yang otonom tanpa relasi dengan Allah. Moralitas etika politik yang mengarah pada manusia yang otonom, tentu memunculkan banyak aspek yang berimbas pada banyaknya standar hidup yang digunakan. Hal ini dalam tataran praktis tentu menyulitkan. Etika politik dengan moralitas ini kemudian bisa dinilai dari sejauh mana etika politis ini mempengaruhi manusia untuk hidup dalam pilihan politisnya sesuai gambaran penciptanya.

b.2.2. Moralitas Pelaku sekaligus Korban

Moralitas ini menekankan peran ganda manusia sebagai pelaku sekaligus korban. Jemaat pasca konflik meyakini bahwa sebagai korban sekalipun jemaat atau gereja tetap memiliki andil penyebab dari konflik sosial yang terjadi. Moralitas seperti ini membawa jemaat untuk ikut bertanggung jawab terhadap perbaikan keadaan sosial masyarakat mereka. Moralitas korban justru membuat jemaat lepas tangan terhadap kewajiban merubah keadaan dan situasi sosial

masyarakat mereka. Semakin jemaat menyadari kenyataan bahwa sedikit banyak mereka memiliki andil dalam konflik, semakin baik jemaat dari segi moral dan tentu saja diiringi upaya nyata untuk merubah keadaan dan menghilangkan prasangka negatif. Sebagai manusia politis, jemaat harus menyadari bahwa perilaku sederhana pun bisa berpengaruh pada wilayah yang lebih luas, oleh karena itu moralitas ini mengajak jemaat untuk tidak menyalahkan pihak lain, tetapi berupaya melahirkan praksis politik yang baru demi pertanggung jawaban moral. Etika politik dengan moralitas seperti ini tidak berusaha mendaftarkan seluruh masalah sosial dan kemudian menyalahkan dan meminta pertanggung jawaban pemerintah atau pihak-pihak terkait. Etika politik bukan upaya untuk menemukan siapa yang salah dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap situasi politis dominan dalam masyarakat. Etika politik seperti ini tidak melulu mencari pihak yang bertanggung jawab tetapi sebaliknya merasa memiliki andil terhadap situasi dominan dalam masyarakat dan kemudian berupaya bertanggung jawab dengan melahirkan praksis politik yang baru demi situasi sosial yang lebih baik. Etika politik dengan moralitas seperti ini juga menyentuh aspek pertobatan dalam praksis politiknya. Pertobatan diri adalah upaya untuk membangun etika politik yang jujur terhadap kelemahan dan kesalahan yang juga sering dilakukan gereja. Dengan pertobatan seharusnya semakin menunjukkan gereja yang bermoral dalam etika politiknya.

b.2.3. Moralitas Pemuridan

Moralitas ini menggambarkan kualitas seorang manusia yang adalah murid Kristus, perilaku kesehariannya diukur dari sejauh mana ia menyerupai Kristus. Moralitas ini menekankan kualitas manusia yang memiliki keutamaan dan perspektif hidup Yesus. Dalam etika politik hasil dialog tersebut, moralitas pemuridan nampak dalam loyalitas para murid kepada mereka yang miskin, tertindas, dan terbuang tetapi tetap tinggal dan berjuang memperbaiki situasi sosial. Seseorang dikatakan baik menurut moralitas ini, dapat diukur dari sejauh mana manusia tersebut memiliki loyalitas dan keberpihakan kepada sesama yang miskin, tertindas, dan terbuang tersebut. Selain itu, moralitas pemuridan ini menekankan jemaat untuk senantiasa melekat dalam tubuh Yesus yang baru yaitu Gereja. Gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah tubuh inkarnasi Yesus Kristus, sehingga hanya dalam tubuh itulah pemuridan bisa benar-benar terlaksanakan optimal. Moralitas ini melihat manusia baik secara moral sejauh mana manusia tersebut dekat dengan tubuh kristus yang baru yaitu Gereja. Moralitas inilah yang memungkinkan para murid untuk tetap tinggal dan menghadapi segala konsekuensi hidup dalam masyarakat yang masih memiliki dendam dan prasangka negatif. Moralitas ini juga mengukur sejauh mana para murid

hidup dalam anugerah Yesus Kristus yang mahal. Moralitas ini menekankan para murid Yesus agar taat menjaga kekudusan hidup sebagai bentuk hormat terhadap karya penebusan Kristus dan juga sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik. Jemaat menyadari konflik terjadi karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pemuda, moralitas ini kemudian dipahami sebagai mekanisme agar jemaat tidak lagi hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang dapat melahirkan konflik lagi.

b.3. Kemungkinan Etika Politik rekonsiliasi

Etika Politik hasil dialog antara Dietrich Bonhoeffer dengan jemaat pasca konflik memiliki kemungkinan untuk diarahkan menuju etika politik rekonsiliasi. Artinya etika politik tersebut harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting rekonsiliasi. Penulis tidak berpretensi dapat langsung begitu saja mengaitkan etika politik pasca konflik menjadi etika politik rekonsiliasi. Penulis hanya akan melihat bahwa beberapa prinsip-prinsip rekonsiliasi dapat dipenuhi oleh etika politik hasil dialog ini. Untuk itu, penulis akan memaparkan beberapa prinsip rekonsiliasi dan kemudian melihat apakah prinsip tersebut dapat dipuaskan oleh nilai-nilai, etika, dan moralitas yang telah penulis bahas sebelumnya.

b.3.1. Prinsip-prinsip Rekonsiliasi

Beberapa prinsip rekonsiliasi yang bisa dijadikan arah pengembangan etika politik mengarah pada prinsip teknis dan prinsip psikis.¹⁶⁶ Penulis melihat bahwa etika politik hasil dialog tersebut memenuhi beberapa prinsip-prinsip rekonsiliasi yaitu hubungan terbuka, luka, dan penarikan diri. Prinsip yang belum atau kurang terpenuhi adalah aspek kesadaran akan kerentanan diri, aspek komitmen untuk rekonsiliasi, dan aspek tindakan beresiko.

Pertama, etika politik gereja pasca konflik menekankan pemuridan jemaat sebagai para murid yang harus memasuki hubungan terbuka dengan dunia. Para murid diajak untuk keluar dari kehidupan yang relatif aman, kepada kehidupan yang tidak aman. Dari kehidupan yang terprediksikan kemungkinannya kepada kehidupan yang tidak terprediksikan sama sekali sebagai bentuk ketaatan pada Yesus Kristus. Konsep etika politik yang taat pada panggilan Yesus ini menurut penulis memenuhi prinsip rekonsiliasi yang memandang setiap hubungan adalah

¹⁶⁶ Lihat Paulus S Widjaja, "Rekonsiliasi Antar Umat Beragama : Refleksi Pengalaman Lapangan" dalam Basilica Dyah Putranti & Asnath Niwa Natar (Ed.), *Perempuan, Konflik dan Rekonsiliasi : Perspektif Teologi dan Praksis*, (Jogjakarta: Pusat Studi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana),p.61

hubungan terbuka.¹⁶⁷ Rekonsiliasi berangkat dari upaya untuk menginternalisir pemahaman bahwa setiap jenis relasi selalu mengandung peluang untuk terluka atau bahagia yang sama, inilah resiko relasi. Etika politik dengan nilai-nilai penerimaan yang memandang bahwa Allah dapat menggunakan kesalahan dan kelemahan manusia untuk karya pemeliharaan, menurut penulis dapat meyakinkan kita untuk menjalani relasi dengan yang lain walaupun terdapat resiko dalam relasi tersebut. Resiko relasi tersebut dapat dipakai Allah untuk karya pemeliharaan, jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalin relasi dengan yang berbeda.

Kedua. Etika politik ini juga menekankan bagaimana sebuah moralitas yang menilai manusia berpotensi menjadi pelaku sekaligus korban dalam konflik. Mereka menyadari bahwa mereka menjadi korban konflik sosial tetapi secara bersamaan juga menyadari bahwa mereka juga memiliki peran dalam membuat hadirnya luka tersebut. Kesiapan untuk menerima luka dengan menyadari kemungkinan luka tersebut disebabkan oleh perilaku sendiri, menurut penulis memenuhi prinsip rekonsiliasi terkait kesadaran akan potensi luka dan keinginan untuk menyembuhkan luka. Luka adalah hal wajar dari relasi, karena itu tidak mungkin menghindari dari luka tetapi kemudian bagaimana mengelola, mengantisipasi, dan menyembuhkannya sebagai nafas utama rekonsiliasi.¹⁶⁸ Luka merupakan resiko relasi, termasuk kemungkinan kita melukai pihak lain. Kesadaran bahwa kita bisa mengalami luka atau bisa menjadi penyebab luka, bahkan bisa mengalami luka dan membuat luka pada orang lain sekaligus, membuat pilihan-pilihan perilaku politis kita lebih bertanggung jawab, termasuk pertanggung-jawaban etis kita kepada sesama. Rekonsiliasi juga menyentuh upaya penyembuhan luka, dan etika politik harus bertanya siapa yang harus menyembuhkan siapa. Etika politik gereja pasca konflik harus mendorong jemaat untuk menyembuhkan luka walaupun secara bersamaan juga terluka, di sinilah makna nilai tanggung jawab dan nilai pelayanan demi karya pemeliharaan Allah menjadi satu.

Ketiga, etika politik hasil dialog tersebut begitu menekankan loyalitas kepada mereka yang miskin, tertindas, dan terbuang tetapi tetap tinggal dan berjuang memperbaiki lingkungan sosial mereka dan relasi sosial mereka. Perilaku seperti ini menunjukkan sikap terbuka terhadap rekonsiliasi, konflik tidak membuat jemaat menarik diri terlalu jauh dan terlalu lama.

¹⁶⁷ Paulus S Widjaja, "Rekonsiliasi Antar Umat Beragama : Refleksi Pengalaman Lapangan" dalam Basilica Dyah Putranti & Asnath Niwa Natar (Ed.), *Perempuan, Konflik dan Rekonsiliasi : Perspektif Teologi dan Praksis*, (Jogjakarta: Pusat Studi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana),p.62

¹⁶⁸ Paulus S Widjaja, "Rekonsiliasi Antar Umat Beragama : Refleksi Pengalaman Lapangan" dalam Basilica Dyah Putranti & Asnath Niwa Natar (Ed.), *Perempuan, Konflik dan Rekonsiliasi : Perspektif Teologi dan Praksis*, (Jogjakarta: Pusat Studi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana),p.63

Keberpihakan kepada sikap tetap tinggal dan berjuang, merupakan sebuah jalan masuk bagi proses rekonsiliasi.¹⁶⁹ Keberpihakan tersebut menunjukkan bahwa penarikan diri yang total bukan pilihan sikap yang baik menurut jemaat. Penarikan diri jemaat harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap wilayah dan lingkungan serta gereja mereka. Penarikan diri bukanlah sikap yang populer atau mendapat simpati dari masyarakat. Menarik diri atau keluar dari lingkaran masyarakat, menurut jemaat justru meninggalkan nilai-nilai perdamaian dan kebersamaan. Jemaat memilih untuk tetap tinggal, membuka diri, memperbaiki relasi sambil mencoba berdamai, bagi penulis adalah terobosan awal bagi rekonsiliasi. Hanya saja menurut penulis sikap jemaat ini belum diimbangi dengan kesadaran akan kerentanan diri. Upaya mengakui keterbatasan, kerentanan, dan kenyataan bahwa mereka memang terluka dan trauma mendalam. Kesadaran diri ini adalah salah satu poin penting dalam upaya rekonsiliasi. Sikap tidak menarik diri, tetapi belum mengakui kerentanan diri membuat proses rekonsiliasi hanya bermain pada kulit luar saja. Sikap yang masih menutupi kerentanan diri, justru melupakan nilai penerimaan termasuk penerimaan terhadap diri yang berdosa dan lemah, tetapi yang tetap bisa dipakai Allah untuk karya pemeliharaannya.

Keempat. Prinsip tindakan beresiko dalam rekonsiliasi sebenarnya telah dilakukan dalam skala tertentu, hanya saja prinsip tindakan beresiko ini tidak bersumber dari komitmen untuk rekonsiliasi yang benar. Jemaat memang mengambil resiko menjalin hubungan dengan umat lain, tetapi tidak berangkat dari sebuah kecerahan batin akan rekonsiliasi. Hal ini yang menurut penulis masih menjadi kelemahan etika politik gereja pasca konflik. Etika politik seharusnya menyentuh juga upaya membangun komitmen rekonsiliasi yang benar yaitu dengan penilaian moral yang tepat, penolakan upaya balas dendam dan prasangka negatif, empati dan restorasi. Tindakan beresiko ini harusnya bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari etika politik. Ketika etika politik berusaha menemukan kerangka berpikir seperti apa yang membuat saya sampai pada jawaban bagaimana saya dapat hidup bersama orang lain dalam satu masyarakat dengan baik, prinsip rekonsiliasi ini memberi masukan bahwa hidup bersama dengan baik, bukan berarti tanpa resiko terluka atau konflik. Artinya, salah satu aspek penting agar sampai pada kehidupan bersama orang lain dengan baik, adalah kesadaran, keberanian, dan kesediaan untuk menanggung setiap resiko yang mungkin muncul dalam relasi kehidupan bersama tersebut. Etika

¹⁶⁹ Paulus S Widjaja, "Rekonsiliasi Antar Umat Beragama : Refleksi Pengalaman Lapangan" dalam Basilica Dyah Putranti & Asnath Niwa Natar (Ed.), *Perempuan, Konflik dan Rekonsiliasi : Perspektif Teologi dan Praksis*, (Jogjakarta: Pusat Studi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana), p.65

politik yang memikirkan prinsip ini tentu menghasilkan perilaku politis yang lebih terbuka terhadap rekonsiliasi.

C. Catatan Akhir

Sampai di sini sebenarnya terlihat kekurangan dari konseptual model yang penulis jadikan kerangka berpikir. Kerangka etika politik yang terdiri dari aspek keyakinan dasar, aspek persepsi, aspek loyalitas, dan aspek penalaran moral masih perlu penambahan beberapa variabel khususnya untuk konteks pasca konflik dimana kebutuhan utama adalah rekonsiliasi terus menerus. Sudah penulis uraikan pada bagian sebelumnya bahwa variabel ini perlu dilengkapi dengan variabel tujuan primer, variabel gambaran keadaan alamiah manusia, dan variabel metanarasi dominan. Sampai di sini penulis merasa perlu untuk menambahkan variabel aspek rekonsiliasi dalam konseptual model tersebut agar upaya menemukan etika politik gereja pasca konflik dapat semakin baik lagi dilakukan. Variabel rekonsiliasi ini akan berisi prinsip-prinsip rekonsiliasi yang akan diteliti dalam kehidupan jemaat. Sejauh mana jemaat menyadari relasi mereka dengan umat lain sebagai relasi terbuka. Sejauh mana jemaat memandang luka dan trauma. Sejauh mana dan seperti apa bentuk-bentuk penarikan diri jemaat karena konflik. Sejauh mana jemaat menyadari dan mengakui kerentanan diri. Sejauh mana komitmen untuk rekonsiliasi itu terbangun, dan sejauh mana tindakan beresiko untuk kembali berelasi dengan umat lain itu dilakukan jemaat. Indikator-indikator ini menurut penulis akan semakin memperkaya upaya kita untuk membentuk etika politik gereja pasca konflik yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeney-Risakotta, Bernard (ed.), 2012, *Mengelola Keragaman di Indonesia : Agama dan isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, Jogjakarta: Penerbit Mizan.
- Bethge, Ebenhard 1970, *Dietrich Bonhoeffer: Man of vision, Man of courage*, (New York: Harper & Row Publishers
- Bethge, Eberhard (Ed.), 1959, *Prisoner For God : Letters and Papers From Prison by Dietrich Bonhoeffer*, New York : The Macmillian Company
- Bethge, Eberhard. 1970, *Dietrich Bonhoeffer : Man of Vision-Man of Courage*, New York: Harper & Row Publisher
- Boff, Leonardo, 2004, *Allah Persekutuan: Ajaran tentang Allah Tritunggal*, (Maumere: Penerbit Ledalero
- Bonhoeffer, Dietrich, 1955, *Ethics*, New York: The Macmillian Company
- Bonhoeffer, Dietrich, 1959, *Creation and Fall*, London: Macmilian Company
- Bonhoeffer, Dietrich, 1966, *The Cost of Discipleship*, New York: The Macmilian Company
- Bonhoeffer, Dietrich, 1966, *Christ The Center*, New York: Harper & Row Publisher
- Bonhoeffer, Dietrich, 1987 “ *The Church and the People of The World*” (1934) Dalam John de Gruchy (Ed.), *Dietrich Bonhoeffer: Witnees to Jesus Christ*, New York: Collins Publisher
- Braithwaites, John (Ed.), 2010, *Anomie and Violence : non-truth and reconciliations in Indonesian Peacebuilding*, Canberra: ANU E Press
- Budi Kleden, Paulus SVD, 2003, *Teologi Terlibat :Politik dan Budaya dalam terang Teologi*, Maumere: Penerbit Ledalero
- Budiman, Calvin S. 2013, *7 Model Kristologi Sosial : Mengaplikasikan Spiritualitas Kristen dalam Etika Sosial*, Malang: Literatur SAAT
- Costa, John Dalla, 1998, *Ethical Imperatif*, Massachusetts: Perseus Books
- de Gruchy, John, 1993, *Saksi Bagi Kristus : Kumpulan Cuplikan Karya Dietrich Bonhoeffer*, Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Deleuse, Gilles & Fellix Guattari, 1987, *A Thousand Plateaus: Capitalism & Schizhoprenia*, USA: The University of Mineasota Press

- Fuller, Reginald H. 1964 *“Liturgy and Devotion”* dalam Martin E. Marty (Ed.), *The Place of Bonhoeffer : Problem and Possibility in His Thought*, New York : Association Press
- Gaus, Gerald F. & Kukathas, Chandran, 2012, *Handbook Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nusamedia
- Green, Clifford, 1999, *“ Human Sociality and Christian Community”*, dalam John W. de Gruchy (Ed.), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer*, UK: Cambridge University Press
- Hadiz, Vendy R, 2005. *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES
- Haris, Syamsudin, 2014, *Masalah-masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Obor
- Hasan, dkk, 2005, *Budaya dan Adat Istiadat Poso*, Jogjakarta: Pustaka Timur
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Kompas
- Kelly, Geffery B. 1999, *“ Prayer and Action for Justice: Bonhoeffer’s Spirituality”* dalam John W. de Gruchy (Ed.), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer*, UK: Cambridge University Press
- Lovin, Robin W. 1983, *Christian Faith And Public Choices : The Social Ethics Of Barth, Brunner, and Bonhoeffer*, Philadelphia: Fortress Pres
- Lukes, Steven, 1974 , *POWER : A Radical View*, London: Macmilian
- Magnis Suseno, Franz, 2015, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme :Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas
- Magnis Suseno, Franz, 2003, *ETIKA POLITIK: Prinsip-prinsip Moral dasar kenegaraan modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Martin, Roderick, 1990, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Rajawali
- Marsh, Charles, 1994, *Reclaiming Dietrich Bonhoeffer : The Promise of His Theology*, New York : Oxford University Press
- Muggeridge, Malcom, 2007, *A Third Testament: A Modern Pilgrims Eksplores the Spiritual Wanderings of Agustine, Blake, Pascal, Tolstoy, Bonhoffer, Kierkegaard, and Dostoevski* USA: Plough Publishing House
- Moses, John A. 1999, *“Bonhoeffer’s Germany :The Political Context”* dalam John W. de Gruchy (Ed.), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer* , Cambridge: Cambridge University Press

- Nelson, John Campbell- 2013, “ Demokrasi Gadungan dan Demokrasi yang Sejati : Neraca Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”, dalam John Campbell-Nelson Dkk (Ed.), *Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru*, Makassar: Oase Intim
- Nelson, F. Burton. 1999, “ *The Life Of Dietrich Bonhoeffer*” dalam John de Gruchy, (Ed.), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer*, UK: Cambridge University Press
- Northcott, Michael, 2009, “ *Who Am I : Human Identity and The Spiritual Disciplines in the Witness of Dietrich Bonhoeffer*” dalam Bernd Wannewetsch, *Who Am I : Bonhoeffer’s Theology through his Poetry*, London : T&T Clark
- Ott, Heinrich, 1966, *Reality and Faith : The Theological Legacy of Dietrich Bonhoeffer*, London: Lutterworth Press
- Pangritz, Andreas, 1999 , “*Who Is Christ, for us, Today*” dalam John W. de Gruchy (Ed), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer*, UK: Cambridge University Press
- Plant, Stephen, 2004, *Bonhoeffer*, London : Continuumbooks
- Purwo Santoso & Tri Susdinarjanti, 2004, “ *Konflik dalam perumusan kebijakan Publik: Potret Persilangan Kepentingan dalam menata Peradaban*” dalam Lambang Triyono dkk (Ed.), *Potret Retak Nusantara : Studi Kasus Konflik di Indonesia*, Jogjakarta: Penerbit CPSP
- Robertson, Edwin H, 1963, *No Rusty Swords, Letters, Lectures and Notes: From Collected Works of Dietrich Bonhoeffer Vol I*, New York: Harper & Row
- Ryan, Alan, 1986 “ *Hobbes, Toleransi dan Kehidupan Batin*” dalam David Miller & Larry Siedentop (Ed.), *Politik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat dan Teori*, Jakarta: CV. Rajawali
- Russell, Bertrand, 1988, *Kekuasaan : Sebuah Analisa sosial baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Singgih, Emmanuel Gerrit, 2005 “Dasar Teologis Kegiatan Politis Orang Kristen di Indonesia Mengikuti Pemilu 2004” dalam *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Sirait. Saut 2006, *Politik Kristen di Indonesia: Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Stassen, Glen H. & Gushee, David P. 2008, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam konteks Masa kini*, Surabaya: Penerbit Momentum
- Tillich, Paul, 1957, *Philosophy and Theology : The Protestan Era*, (Chicago: The University Press of Chicago
- Ulrich, Hans 2009, G, “ *Station on the way to freedom : The Presence of God-the Freedom of Disciples*” dalam Bernd Wannewetsch (ed.), *Who Am I : Bonhoeffer’s Theology through his Poetry*, London: T&T Clark

- Widjaja, Paulus S. 2010 “ *Rekonsiliasi Antar Umat Beragama : Refleksi Pengalaman Lapangan*” dalam Basilia Dyah Putranti & Asnath Niwa Natar (Ed.), *Perempuan, Konflik dan Rekonsiliasi : Perspektif Teologi dan Praksis*, Jogjakarta: Pusat Studi Feminis Universitas Kristen Duta Wacana
- Widjaja, Paulus S. 2004 “*Membangun Teologi Politis di Indonesia: Dari Teologi sukses kearah Teologi Pelayanan dan Doksologi*”
- Willmer, Haddon. 1999, “*Costly Discipleship*”, dalam John de Grucy (Ed.), *The Cambridge Companion To Dietrich Bonhoeffer*, UK: Cambridge University Press
- Wogaman, J. Philip, 1988, *Christian Perspectives on Politics*, Philadelphia: Fortress Press
- Wolf, Jonathan, 2013, *Pengantar Filsafat Politik*, Bandung: Penerbit Nusamedia
- Y.B. Mangunwijaya, 1999, “*Agenda Pembaharuan Tuntas Indonesia*”. Dalam St. Sularto, *Refleksi Agenda Reformasi : Membangun Masyarakat Madani*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius

